



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUASIN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2019



KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

No.11 Sekojo Telp.(0711) 7690008 Fax. 7690078 kode Pos 30753 Pangkalan Balai
website : bpkad.banyuasinkab.go.id email : bpkad@banyuasinkab.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan sesuai dengan ketentuan.

Laporan Kinerja merupakan subsistem dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan salah satu media pertanggungjawaban BPKAD Kabupaten Banyuasin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan tata kerjanya serta berperan dalam mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD Kabupaten Banyuasin selama tahun 2019. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja BPKAD Kabupaten Banyuasin.

Dengan mengingat bahwa kesempurnaan hanya milik Allah, diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Pangkalan Balai, Januari 2020

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,**



SUBAGIO, Ak., CA.

Pembina Utama Muda

NIP. 196510231987031001



DAFTAR ISI

	hal.
BAB I - PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Kewenangan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi	1
C. Isu Strategis	2
D. Sistematika Pelaporan	2
BAB II - PERJANJIAN KINERJA	3
BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. CAPAIAN KINERJA	8
1. Indikator Kinerja 1:	
Perda APBD Tahun n+1 Ditetapkan ≤ 31 Desember Tahun n	9
1.1. Analisis Kinerja	10
1.2. Analisis Efisiensi Sumber Daya	11
1.3. Analisis Program/Kegiatan	13
2. Indikator Kinerja 2:	
Opini BPK terhadap LKPD n – 1	14
2.1. Analisis Kinerja	15
2.2. Analisis Efisiensi Sumber Daya	15
2.3. Analisis Program/Kegiatan	17
3. Indikator Kinerja 3:	
Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pelayanan	19
3.1. Analisis Kinerja	19
3.2. Analisis Efisiensi Sumber Daya	20
3.3. Analisis Program/Kegiatan	22
4. Indikator Kinerja 4:	
Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	23
4.1. Analisis Kinerja	24
4.2. Analisis Efisiensi Sumber Daya	25
4.3. Analisis Program/Kegiatan	26
5. Kinerja SKPKD/PPKD	27
5.1. Pendapatan	28
5.2. Belanja	29
B. REALISASI KEUANGAN	32
1. Indikator Kinerja 1:	
Perda APBD Tahun n+1 Ditetapkan ≤ 31 Desember Tahun n	34
2. Indikator Kinerja 2:	
Opini BPK terhadap LKPD n – 1	35
3. Indikator Kinerja 3:	
Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pelayanan	36
4. Indikator Kinerja 4:	
Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	37
C. INOVASI DAN PENGHARGAAN	38
BAB IV - PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

Judul	Nama Tabel	hal.
Tabel 2.1	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2019 BPKAD Kabupaten Banyuasin	5
Tabel 3.A.1.	Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2019 BPKAD Kabupaten Banyuasin	8
Tabel 3.A.1.1	Capaian Kinerja Indikator 1: Perda APBD Tahun n+1 Ditetapkan ≤ 31 Desember Tahun n	9
Tabel 3.A.1.2	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Banyuasin Mengacu Permendagri Nomor 33 Tahun 2019	11
Tabel 3.A.1.3	Efisiensi Anggaran Tahun 2014 – 2019 Indikator Kinerja Perda APBD Tahun n+1 Ditetapkan ≤ 31 Desember Tahun n	10
Tabel 3.A.1.4	Capaian Kinerja Outcome Priode Renstra Tahun 2014 – 2018 dan Tahun 2019 Program Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Daerah	13
Tabel 3.A.1.5	Capaian Kinerja Tahun 2019 Kegiatan Indikator Kinerja Perda APBD Tahun n+1 Ditetapkan ≤ 31 Desember Tahun n	13
Tabel 3.A.2.1	Capaian Kinerja Indikator 2: Opini BPK terhadap LKPD n-1	14
Tabel 3.A.2.2	Efisiensi Anggaran Tahun 2014 – 2019 Indikator Kinerja Opini BPK terhadap LKPD n-1	16
Tabel 3.A.2.3	Capaian Kinerja Outcome Priode Renstra Tahun 2014 – 2018 dan Tahun 2019 Program Pendukung Kinerja Opini BPK terhadap LKPD n-1	17
Tabel 3.A.2.4	Capaian Kinerja Tahun 2019 Kegiatan Indikator Kinerja Opini BPK terhadap LKPD n-1	18
Tabel 3.A.3.1	Capaian Kinerja Indikator 3: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pelayanan	19
Tabel 3.A.3.2	Skor Survey Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pelayanan Tahun 2015 – 2018 dan Tahun 2019	20
Tabel 3.A.3.3	Efisiensi Anggaran Tahun 2014 – 2019 Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pelayanan	21
Tabel 3.A.3.4	Capaian Kinerja Outcome Priode Renstra Tahun 2014 – 2018 dan Tahun 2019 Program Pendukung Kinerja Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pelayanan	22
Tabel 3.A.3.5	Capaian Kinerja Tahun 2019 Kegiatan Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pelayanan	23
Tabel 3.A.4.1	Capaian Kinerja Indikator 4: Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	24
Tabel 3.A.4.2	Efisiensi Anggaran Tahun 2014 – 2019 Indikator Kinerja Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	25
Tabel 3.A.4.3	Capaian Kinerja Outcome Priode Renstra Tahun 2014 – 2018 dan Tahun 2019 Program Pendukung Kinerja Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	26
Tabel 3.A.4.4	Capaian Kinerja Tahun 2019 Kegiatan Indikator Kinerja Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	27
Tabel 3.A.5.1	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah (PPKD) Tahun 2019	28
Tabel 3.A.5.2	Target dan Realisasi Belanja Daerah (PPKD) Tahun 2019	30
Tabel 3.A.5.3	Target dan Realisasi Penyaluran Belanja Daerah (PPKD) Tahun 2019	31
Tabel 3.A.5.4	Penyampaian Pertanggungjawaban (SPJ) oleh Penerima	31
Tabel 3.B.1	Target dan Realisasi Keuangan Tahun 2014 – 2018 dan Tahun 2019	32
Tabel 3.B.1.1	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 Program Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Daerah	34
Tabel 3.B.2.1	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 Program Pendukung Kinerja Opini BPK terhadap LKPD n-1	35
Tabel 3.B.3.1	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 Program Pendukung Kinerja Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pelayanan	36
Tabel 3.B.4.1	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 Program Pendukung Kinerja Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	37

DAFTAR GAMBAR

Judul	Nama Gambar	hal.
Gambar 2.1.	Cascading Kinerja Tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin	7
Gambar 3.A.1.1	Rasio Efisiensi Anggaran Tahun 2014 – 2019 Indikator Kinerja Perda APBD Tahun n+1 Ditetapkan \leq 31 Desember Tahun n	11
Gambar 3.A.2.1	Rasio Efisiensi Anggaran Tahun 2014 – 2019 Indikator Kinerja Opini BPK terhadap LKPD n-1	16
Gambar 3.A.3.1	Rasio Efisiensi Anggaran Tahun 2014 – 2019 Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pelayanan	21
Gambar 3.A.4.1	Rasio Efisiensi Anggaran Tahun 2014 – 2019 Indikator Kinerja Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	25
Gambar 3.B.1	Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 – 2018 dan Tahun 2019	33
Gambar 3.C.1	Aplikasi Kinerja Kabupaten Banyuasin	38
Gambar 3.C.2	Aplikasi Sistem Informasi Barang Persediaan Kabupaten Banyuasin	39
Gambar 3.C.3	Aplikasi Siapmas Kabupaten Banyuasin	39
Gambar 3.C.4	Aplikasi Simpel Kabupaten Banyuasin	40
Gambar 3.C.5	Aplikasi SiapBOS Kabupaten Banyuasin	41
Gambar 3.C.6	Aplikasi Apelpen Kabupaten Banyuasin	41
Gambar 3.C.7	Orientasi, Supervisi, Asistensi dan Bimbingan Teknis Implementasi Simd@ Integrated Kabupaten Banyuasin	42
Gambar 3.C.8	Asistensi dan Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Proses Bisnis BPKAD Kabupaten Banyuasin	43
Gambar 3.C.9	Bupati Banyuasin Menerima Piagam WTP dari BPK RI	44



DAFTAR LAMPIRAN

Judul	Nama Lampiran
Lampiran 1	Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019
Lampiran 3	Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Lampiran 4	Rencana Kinerja Tahunan 2019
Lampiran 5	Rencana Kinerja Tahunan 2020
Lampiran 6	Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
Lampiran 7	Indikator Kinerja Utama Tahun 2020
Lampiran 8	Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019
Lampiran 9	Rencana Kerja Tahun 2020
Lampiran 10	Renstra 2018 – 2023
Lampiran 11	Rencana Aksi 2019
Lampiran 12	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2019
Lampiran 13	Rencana Aksi Tahun 2020
Lampiran 14	Monitoring Rencana Aksi 2019



EXECUTIVE SUMMARY

(IKHTISAR EKSEKUTIF)

Rata-rata kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin pada tahun 2019 mencapai 106,89%. Capaian kinerja ini lebih baik dari capaian kinerja tahun 2018 sebelumnya dan juga lebih baik dari capaian kinerja rata-rata renstra periode 2014 – 2018 serta telah melampaui target tahapan renstra 2018 – 2023. Dari 4 indikator kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala BPKAD Kabupaten Banyuasin dengan Bupati Banyuasin, seluruhnya (100,00%) berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan satu indikator kinerja dengan capaian kinerja di atas 100,00% (127,57%).

Di tingkat sasaran, rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 112,33%. Capaian ini lebih baik dari capaian kinerja pada tahun 2018 sebelumnya juga lebih baik dari capaian kinerja rata-rata periode renstra 2014 – 2018 serta telah melampaui target tahapan renstra 2018 – 2023.

Di tingkat program, rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 110,88%. Capaian ini lebih baik dari capaian kinerja pada tahun 2018 sebelumnya juga lebih baik dari capaian kinerja rata-rata periode renstra 2014 – 2018 serta telah melampaui target tahapan renstra 2018 – 2023.

Di tingkat kegiatan, rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 100,00%. Capaian ini lebih baik dari capaian kinerja pada tahun 2018 sebelumnya juga lebih baik dari capaian kinerja rata-rata periode renstra 2014 – 2018 serta telah sesuai target tahapan renstra 2018 – 2023.

Dari segi realisasi anggaran, penyerapan pada tahun 2019 untuk indikator kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala BPKAD Kabupaten Banyuasin dengan Bupati Banyuasin mencapai 91,45%. Capaian ini lebih baik dari capaian kinerja pada tahun 2018 sebelumnya juga lebih baik dari capaian kinerja rata-rata periode renstra 2014 – 2018 serta di atas target penyerapan anggaran kabupaten yang ditetapkan sebesar 90,00%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin (selanjutnya disebut BPKAD), dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11) dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 141 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 141).

B. Kewenangan Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Sebagaimana diatur melalui Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 141 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan dengan tugas fungsi penunjang Keuangan sub Pengelolaan Keuangan, Aset Daerah dan Pajak Daerah sesuai Kewenangan dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku. Selain itu BPKAD Kabupaten Banyuasin juga bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)¹ sehingga berperan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan merangkap Bendahara Umum Daerah (BUD) termasuk pengelolaan asset daerah Kabupaten Banyuasin. Peran ini sejalan dengan peran Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tatanan Pemerintah Pusat.

¹ Pasal 1 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah



C. Isu Strategis

Isu Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin sebagaimana digambarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan kinerja opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah dicapai sebanyak 7 (tujuh) kali secara berturut-turut sejak tahun 2011 sampai dengan 2017 sebagai salah satu indikator Sustainable Development Goals (SDGs) di bidang keuangan.
2. Mempertahankan kinerja Penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan tepat waktu yang selama periode renstra 2014 – 2018 selalu berhasil dicapai.
3. Mewujudkan persentase ideal SILPA terhadap APBD.
4. Mempertahankan kondisi ideal alokasi anggaran pendidikan, kesehatan dan dana desa dalam APBD.
5. Mewujudkan kondisi ideal alokasi belanja langsung dalam APBD.
6. Meningkatkan sistem dan prosedur serta kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan pelayanan prima.

D. Sistematika Pelaporan

LKjIP BPKAD Tahun 2019 melaporkan pencapaian kinerja BPKAD selama tahun 2019. Capaian kinerja tahun 2019 diukur dan dinilai berdasarkan dengan membandingkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap perjanjian kinerja tahun 2019 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja atau performance gate sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Dengan adanya pola pikir seperti ini sistematika pelaporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin dapat diilustrasikan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

- Bab I** : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Gambaran Umum, Kewenangan tugas pokok dan struktur organisasi, Isu strategis serta Sistematika Laporan Kinerja.
- Bab II** : Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2019.
- Bab III** : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran Kinerja Tahun 2019, Analisis capaian kinerja, Realisasi Keuangan, Prestasi dan Penghargaan dan Tindak lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya.
- Bab IV** : Penutup, menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan DPPKAD Kabupaten Banyuasin untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja tahun 2019 dituangkan dalam Rencana Strategis 2018 – 2023, Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019, Perubahan Rencana Kinerja Tahunan 2019 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019. Keseluruhan perubahan dokumen perencanaan di atas merupakan suatu keharusan karena adanya perubahan dasar hukum tentang organisasi perangkat daerah.

Untuk tahun 2019 terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 antara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin dengan Bupati Banyuasin, yaitu:

1. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Kabupaten Banyuasin ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 yang ditargetkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
3. Tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan dengan target kinerja sebesar 94,25%.
4. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan target kinerja sebesar 6,02%. ***Kinerja indikator ini menjadi target BPKAD Kabupaten Banyuasin hanya sampai dengan triwulan I tahun 2019. Untuk triwulan II sampai dengan triwulan IV menjadi target kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin***

Dari keempat indikator kinerja tersebut diturunkan menjadi 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja eselon III sebagai berikut:

1. Indikator Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Kabupaten Banyuasin ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019 diturunkan menjadi 5 indikator eselon III:
 - 1.1. Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman penyusunan APBD sesuai Prinsip Penganggaran yang Baik.
 - 1.2. Persentase aparatur perencanaan anggaran Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan perencanaan anggaran.
 - 1.3. Persentase tahapan penyusunan APBD tepat waktu.
 - 1.4. Persentase Pemenuhan Alokasi Anggaran APBD.
 - 1.5. Persentase konsistensi perencanaan dengan penganggaran.

2. Indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 yang ditargetkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diturunkan menjadi 13 indikator eselon III:
 - 2.1. Tingkat pemenuhan pedoman/peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah.
 - 2.2. Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan sosialisasi/ bimbingan teknis penatausahaan keuangan.
 - 2.3. Persentase penyerapan anggaran APBD.
 - 2.4. Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu.
 - 2.5. Persentase kasus TP/TGR selesai diputus Majelis TP/TGR.
 - 2.6. Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016.
 - 2.7. Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD.
 - 2.8. Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan BMD sesuai ketentuan.
 - 2.9. Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD.
 - 2.10. Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi.
 - 2.11. Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP.
 - 2.12. Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan keuangan.
 - 2.13. Persentase LKPD disajikan tepat waktu.
3. Indikator Tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan dengan target kinerja sebesar 94,25% diturunkan menjadi 6 indikator eselon III:
 - 3.1. Capaian kerja aparatur yang baik.
 - 3.2. Perilaku aparatur yang baik.
 - 3.3. Tingkat kehadiran aparatur dalam 1 tahun.
 - 3.4. Maturitas SPIP
 - 3.5. Level PMPRB
 - 3.6. Nilai evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun n-1.
4. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan target kinerja sebesar 6,02% diturunkan menjadi 4 indikator eselon III. **Kinerja indikator ini menjadi target BPKAD Kabupaten Banyuasin hanya sampai dengan triwulan I tahun 2019. Untuk triwulan II sampai dengan triwulan IV menjadi target kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin:**
 - 4.1. Pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah non PBB dan BPHTB.
 - 4.2. Pertumbuhan penerimaan PBB dan BPHTB.
 - 4.3. Capaian target penerimaan PAD non Pajak Daerah.
 - 4.4. Capaian target penerimaan pendapatan non PAD.

Kedua puluh delapan indikator kinerja eselon III tersebut di atas kemudian diturunkan lagi ke dalam 15 program dan 62 kegiatan yang menjadi indikator kinerja eselon IV sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2019 yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja selama tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2019
BPKAD Kabupaten Banyuasin

No	Indikator Kinerja Utama	No	Indikator Sasaran	No	Nama Program	No	Nama Kegiatan		
1	Perda APBD Tahun n+1 Ditetapkan <= 31 Desember Tahun n	1.1	Tingkat Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Penyusunan APBD Sesuai Prinsip Penganggaran yang Baik	1	Program Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Daerah	1	Penyusunan Perda dan Perbup APBD		
		1.2	Persentase Aparatur Perencanaan Anggaran Perangkat Daerah Mendapatkan Pembinaan Perencanaan Anggaran			2	Penyusunan Perda dan Perbup PAPBD		
		1.3	Persentase Tahapan Penyusunan APBD Tepat Waktu			3	Penyusunan Perbup Standar Biaya		
		1.4	Persentase Pemenuhan Alokasi Anggaran APBD			4	Penyusunan Perbup Standar Satuan Harga		
		1.5	Persentase Konsistensi Perencanaan dengan Penganggaran			5	Penyusunan SE Pedoman Penyusunan RKA		
						6	Penyusunan KUA PPAS dan KUPAPBD/PPASP		
						7	Penyusunan Analisis Standar Belanja		
						8	Penyusunan Perbup tentang Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan		
2	Opini BPK RI atas LKPD Tahun n-1	2.1	Tingkat Pemenuhan Pedoman/Peraturan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2	Program Optimalisasi Penatausahaan Belanja Daerah	9	Penyusunan Perbup Pedoman Pelaksanaan APBD		
		2.2	Persentase Pengelola Keuangan Perangkat Daerah Mendapatkan Pembinaan Penatausahaan Keuangan			10	Sosialisasi Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Daerah		
		2.3	Persentase Penyerapan Anggaran APBD			11	Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Daerah		
		2.4	Persentase Penerbitan SP2D Sesuai Persyaratan Tepat Waktu			12	Penyusunan Peraturan dan Pedoman Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Daerah		
		2.5	Persentase Kasus TP/TGR Selesai Diputus TPKD/Majelis TP/TGR (Diterbitkan SKTJM/SK Pembebanan/SK Pembebasan)			13	Manajemen Kas		
						14	Permutakhiran dan Pemeliharaan Data Gaji		
						15	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi		
		2.6	Tingkat Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Pengelolaan BMD Sesuai Permendagri 19/2016			3	Program Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	16	Pengendalian dan Penertiban BMD
		2.7	Persentase Pengelola BMD Perangkat Daerah Mendapatkan Pembinaan Penatausahaan BMD					17	Pembinaan dan Sosialisasi Peraturan Pengelolaan BMD BMD
		2.8	Persentase Perangkat Daerah Melaksanakan Perencanaan BMD Sesuai Ketentuan					18	Penyusunan Laporan Semesteran BMD
		2.9	Persentase Perangkat Daerah yang Aktif Melakukan Rekonsiliasi Laporan BMD					19	Penyusunan Laporan Akhir Tahun BMD
								20	Penyusunan Peraturan Pengelolaan BMD
								21	Penyusunan RKBMD dan RKPBM
								22	Pemanfaatan BMD
								23	Penetapan Status Penggunaan BMD
								24	Mutasi dan Penggunaan BMD
								25	Pengamanan BMD
						26	Penyusunan Laporan Pemeliharaan BMD		
						27	Pemindahtanganan dan Pemusnahan BMD		
						28	Inventarisasi BMD		
		2.10	Tingkat Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Pengelolaan Akuntansi			4	Program Peningkatan Kualitas Informasi Keuangan Daerah	29	Penyusunan Laporan Berkala Pemerintah Daerah
		2.11	Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang Mendapat Pembinaan Penyusunan Laporan Sesuai SAP					30	Bimbingan Teknis Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		2.12	Persentase Perangkat Daerah yang Aktif Melakukan Rekonsiliasi Laporan Keuangan					31	Movev Penatausahaan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
		2.13	Persentase LKPD Disajikan Tepat Waktu					32	Penyusunan Peraturan dan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
								33	Penyusunan Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
								34	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

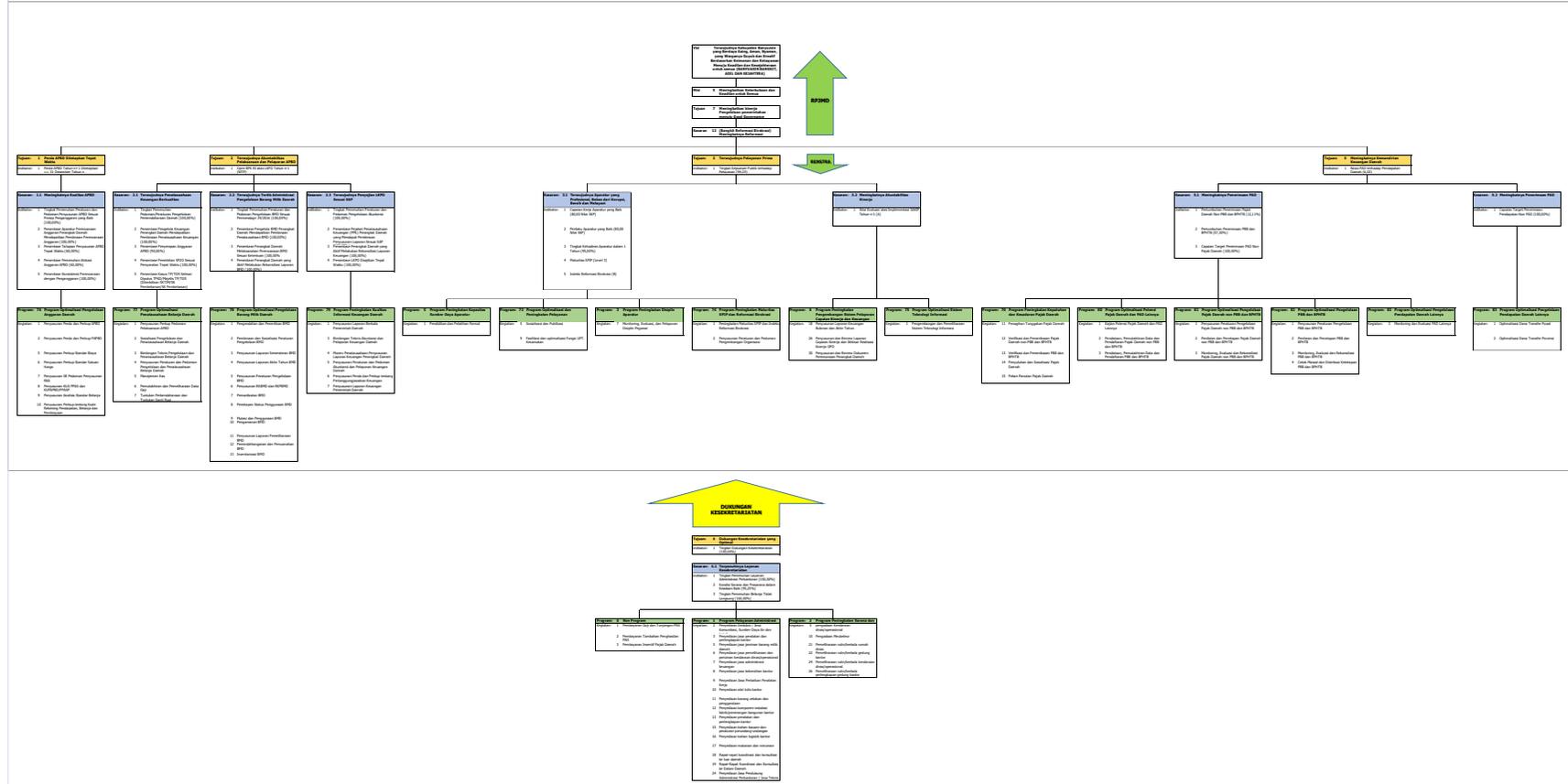
No	Indikator Kinerja Utama	No	Indikator Sasaran	No	Nama Program	No	Nama Kegiatan
3	Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pelayanan	3.1	Capaian Kerja Aparatur yang Baik	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35	Pendidikan dan Pelatihan Formal
				6	Program Optimalisasi dan Peningkatan Pelayanan	36	Sosialisasi dan Publikasi
		3.2	Perilaku Aparatur yang Baik	7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	37	Fasilitasi dan optimalisasi Fungsi UPT. Kecamatan
				38	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Disiplin Pegawai		
		3.3	Tingkat Kehadiran Aparatur dalam 1 Tahun	8	Program Peningkatan Maturitas SPIP dan Reformasi Birokrasi	39	Peningkatan Maturitas SPIP dan Indeks Reformasi Birokrasi
		3.4	Maturitas SPIP			40	Penyusunan Peraturan dan Pedoman Pengembangan Organisasi
		3.5	Level RB	9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	41	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Akhir Tahun
		3.6	Nilai Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun n-1			42	Penyusunan dan Review Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
						43	Penyusunan dan Review Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						10	Program Optimalisasi Sistem Teknologi Informasi
4	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	4.1	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB	11	Program Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Pajak Daerah	45	Penagihan Tunggal Pajak Daerah
						46	Verifikasi dan Pemeriksaan Pajak Daerah non PBB dan BPHTB
				47	Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah		
				12	Program Optimalisasi Potensi Pajak Daerah dan PAD Lainnya	48	Kajian Potensi Pajak Daerah dan PAD Lainnya
				49	Pendataan, Pemutakhiran Data dan Pendaftaran Pajak Daerah non PBB dan BPHTB		
				13	Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah non PBB dan BPHTB	50	Penyusunan Peraturan Pengelolaan Pajak Daerah non PBB dan BPHTB
		51	Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah non PBB dan BPHTB				
		52	Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi Pajak Daerah non PBB dan BPHTB				
		4.2	Pertumbuhan Penerimaan PBB dan BPHTB	11	Program Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Pajak Daerah	53	Verifikasi dan Pemeriksaan PBB dan BPHTB
						54	Pekan Panutan Pajak Daerah
				12	Program Optimalisasi Potensi Pajak Daerah dan PAD Lainnya	55	Pendataan, Pemutakhiran Data dan Pendaftaran PBB dan BPHTB
				14	Program Optimalisasi Pengelolaan PBB dan BPHTB	56	Penyusunan Peraturan Pengelolaan PBB dan BPHTB
				57	Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB		
				58	Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi PBB dan BPHTB		
				59	Cetak Massal dan Distribusi Ketetapan PBB dan BPHTB		
		4.3	Capaian Target Penerimaan PAD Non Pajak Daerah	15	Program Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Lainnya	60	Monitoring dan Evaluasi PAD Lainnya
		4.4	Capaian Target Penerimaan Pendapatan Non PAD	15	Program Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Lainnya	61	Optimalisasi Dana Transfer Pusat
						62	Optimalisasi Dana Transfer Provinsi

Sumber: Renstra 2018 - 2013



Gambar 2.1
Cascading Kinerja Tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
CASCADING KINERJA

Tahun : 2019
Perangkat Daerah : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuasin mencapai 106,89%. Capaian kinerja diperoleh dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Dari 4 indikator kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala BPKAD Kabupaten Banyuasin dengan Bupati Banyuasin, seluruhnya (100,00%) berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan satu indikator kinerja dengan capaian kinerja di atas 100,00% (127,57%).

Tabel 3.A.1
Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2019
BPKAD Kabupaten Banyuasin

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Renstra Periode 2014 -2018						2019	Target Capaian Renstra 2019-2023	Keterangan
		2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata			
1	Perda APBD Tahun n+1 Ditetapkan ≤ 31 Desember Tahun n	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sama dengan Capaian Tahun 2018 Sama dengan Rata-rata Capaian Renstra 2014-2018 Sama dengan Target Capaian Renstra 2019-2023
2	Opini BPK terhadap LKPD n-1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sama dengan Capaian Tahun 2018 Sama dengan Rata-rata Capaian Renstra 2014-2018 Sama dengan Target Capaian Renstra 2019-2023
3	Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pelayanan	n/a	88,23	100,00	95,89	100,00	96,03	100,00	100,00	Sama dengan Capaian Tahun 2018 Lebih Tinggi Rata-rata Capaian Renstra 2014-2018 Sama dengan Target Capaian Renstra 2019-2023
4	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	111,32	107,26	96,05	113,71	108,08	107,28	127,57	100,00	Lebih Tinggi dari Capaian Tahun 2018 Lebih Tinggi Rata-rata Capaian Renstra 2014-2018 Lebih Tinggi dari Target Capaian Renstra 2019-2023
Rata-rata		103,77	98,87	99,01	102,40	102,02	100,83	106,89	100,00	Lebih Tinggi dari Capaian Tahun 2018 Lebih Tinggi Rata-rata Capaian Renstra 2014-2018 Lebih Tinggi dari Target Capaian Renstra 2019-2023

Sumber: Pengolahan Data Kinerja



Keberhasilan pencapaian target kinerja pada tahun 2019 ini didukung oleh capaian indikator kinerja pada level yang lebih rendah sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja sasaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing eselon III, terdiri atas 30 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 112,33%.
2. Capaian indikator kinerja program (*outcome*) yang menjadi tanggung jawab eselon III, terdiri atas 35 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 110,88%.
3. Capaian indikator kinerja kegiatan (*output*) yang tanggung jawab eselon IV, terdiri atas 86 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,00%.
4. Kinerja fisik program dan kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,00%.

1. Indikator Kinerja 1: Perda APBD Tahun n+1 Ditetapkan ≤ 31 Desember Tahun n

Untuk tahun 2019 target kinerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja antara Kepala BPKAD Kabupaten Banyuasin dengan Bupati Banyuasin adalah ≤31 Desember 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Realisasi kinerja indikator ini adalah perda APBD Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 02 Desember 2019 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 07 Tahun 2019 tentang APBD Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 07 Tahun 2019 tanggal 02 Desember 2019) dan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 186 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 186 Tahun 2019 tanggal 02 Desember 2019) sehingga capaian kerjanya adalah sebesar **100,00%**.

Tabel 3.A.1.1
Capaian Kinerja Indikator 1:
Perda APBD Tahun n+1 Ditetapkan ≤ 31 Desember Tahun n

No	Tahun APBD	Target Penetapan APBD	Tanggal Penetapan APBD	Capaian Kinerja	Keterangan
1	2015	≤ 31 Desember 2014	31 Desember 2014	100,00%	Perda No. 21/2014
2	2016	≤ 31 Desember 2015	28 Desember 2015	100,00%	Perda No. 07/2015
3	2017	≤ 31 Desember 2016	28 Desember 2016	100,00%	Perda No. 20/2016
4	2018	≤ 31 Desember 2017	28 Desember 2017	100,00%	Perda No. 10/2017
5	2019	≤ 31 Desember 2018	26 Desember 2018	100,00%	Perda No. 12/2018
6	2020	≤ 31 Desember 2019	02 Desember 2019	100,00%	Perda No. 07/2019
Rata-rata Capaian Kinerja				100,00%	

Sumber: Pengolahan Data Kinerja

Dari tabel 3.1 dan tabel 3.1.1 terlihat bahwa capaian kinerja indikator ini pada tahun 2014 – 2018 (renstra periode 2014 – 2018) dan pada tahun 2019 selalu mencapai target yang telah ditetapkan dalam artian bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selalu ditetapkan tepat waktu (≤ 31 Desember tahun n-1) sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Capaian kinerja pada tahun 2019 ini sama dengan capaian kinerja pada tahun 2018 dan rata-rata capaian kinerja renstra periode 2014 – 2018.



1.1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian target kinerja ini pada tahun 2019 didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Komitmen yang tinggi TAPD dan seluruh perangkat daerah bersama-sama DPRD Kabupaten Banyuasin dalam perencanaan dan penyusunan APBD Tahun 2020.
2. Optimalisasi Sistem Teknologi Informasi pengelolaan keuangan melalui aplikasi SIMDA mulai dari penganggaran, penatausahaan dan pelaporan.
3. Pemenuhan Peraturan dan pedoman penyusunan APBD sesuai prinsip penganggaran yang baik sebagai pedoman penyusunan APBD 2020, meliputi:
 - a. SE Pedoman Penyusunan RKA (No. 900/1325/BPKAD-Ag/2019 tanggal 19 Agustus 2019).
 - b. Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020 (Perbup No. 114 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019).
 - c. Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun 2020 (Perbup No. 115 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019).
 - d. Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja (Perbup No. 100 Tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017).
4. Pembinaan terus menerus untuk meningkatkan kompetensi aparatur perencanaan anggaran perangkat daerah Kabupaten Banyuasin.
5. Capaian indikator kinerja program (*outcome*) yang menjadi tanggung jawab eselon III, terdiri atas 5 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,00%.
6. Capaian indikator kinerja kegiatan (*output*) yang tanggung jawab eselon IV, terdiri atas 8 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,00%.
7. Kinerja fisik program dan kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,00%.

Sedangkan permasalahan yang ditemui dalam pencapaian kinerja indikator ini adalah masih ada beberapa tahapan penyusunan APBD yang belum dilaksanakan tepat waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD. Dari 13 tahapan yang ditargetkan tepat waktu, hanya 9 tahapan yang berhasil mencapai target sehingga capaian kinerjanya hanya 69,23%. Hal ini merupakan peningkatan dari kinerja dari periode renstra 2014 – 2018 yang rata-rata capaian kinerjanya hanya mencapai 53,85%. Target kinerja untuk pemenuhan tahapan ini hanya ditetapkan sebesar 60,00% sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,00%.

Tabel 3.A.1.2
Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Banyuasin Mengacu Permendagri Nomor 33 Tahun 2019

No	Tahapan	Waktu	Lama	Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah	paling lambat minggu I bulan Juli		- 06/07/2019	10/07/2019	-	
2	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	paling lambat minggu II bulan Juli		- 13/07/2019	16/07/2019	-	
3	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	paling lambat minggu II bulan Agustus		- 10/08/2019	19/08/2019	-	
4	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA PPKD			- 17/08/2019	19/08/2019	-	
5	Penyusunan dan pembahasan RKA SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	paling lambat minggu III bulan Agustus		- 17/08/2019	n/a	100,00	
6	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu	60 (enam puluh) hari kerja sejak disampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	- 14/09/2019	00/08/2019	100,00	
7	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan		100,00	30/11/2019	09/09/2019	100,00
8	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama		100,00	03/12/2019	09/09/2019	100,00
9	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur		100,00	20/12/2019	07/10/2019	100,00
10	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)		100,00	29/12/2019	28/10/2019	100,00
11	Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada menteri dalam negeri/Gubernur	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan		100,00	31/12/2019	29/10/2019	100,00
12	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	paling lambat akhir Desember (31 Desember)		100,00	31/12/2019	02/12/2019	100,00
13	Penyampaian peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan		100,00	08/01/2020		100,00
Rata-rata				53,85			69,23

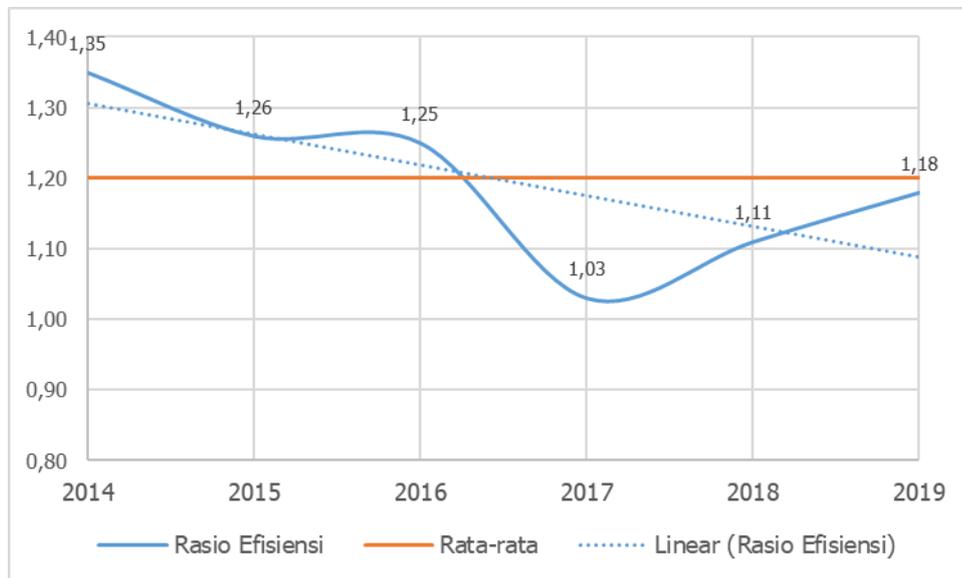
Sumber: Pengolahan Data Kinerja

Untuk masa yang akan datang perlu ditingkatkan koordinasi antara seluruh pemangku kepentingan sehingga seluruh tahapan penyusunan APBD ini dapat dipenuhi.

1.2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan penyerapan alokasi anggaran. Untuk indikator kinerja Perda APBD Tahun n+1 Ditetapkan ≤ 31 Desember Tahun n tingkat penyerapan anggarannya adalah sebesar 84,63%. Dengan capaian kinerja sebesar 100,00% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator ini adalah $(100,00 : 84,63) = 1 : 1,18$ dalam artian bahwa penggunaan 1 unit anggaran menghasilkan 1,18 unit kinerja.

Gambar 3.A.1.1
Rasio Efisiensi Anggaran Tahun 2014 – 2019
Indikator Kinerja Perda APBD Tahun n+1 Ditetapkan ≤ 31 Desember Tahun n



Sumber: Pengolahan Data Kinerja

Dari gambar di atas terlihat *trend* menurun rasio efisiensi ini. Dari sudut pandang lain dapat juga dikatakan bahwa semakin kecil rasio efisiensi menunjukkan semakin baiknya perencanaan anggaran yang dilakukan. Dari sudut pandang ini maka perencanaan anggaran pada tahun 2017 merupakan perencanaan anggaran terbaik selama periode renstra 2014 – 2019. Rasio efisiensi pada tahun 2019 ini lebih tinggi daripada rasio tahun 2018 tetapi lebih rendah dari rata-rata periode 2014 – 2019. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 1 : 1,35 dan capaian terendah pada tahun 2017 sebesar 1 : 1,03. Efisiensi anggaran terjadi pada tiga komponen belanja utama sebagai sebagaimana tabel 3.1.3 berikut.

Tabel 3.A.1.3
Efisiensi Anggaran Tahun 2014 – 2019
Indikator Kinerja Perda APBD Tahun n+1 Ditetapkan ≤ 31 Desember Tahun n

Komponen Belanja	Pagu Anggaran (juta)			Realisasi Anggaran (juta)			Efisiensi Anggaran (%)		
	2014-2018	2018	2019	2014-2018	2018	2019	2014-2018	2018	2019
Belanja Pegawai	1.491,30	194,25	192,25	1.392,85	191,90	192,25	6,60	1,21	0,00
Perjalanan Dinas	5.009,60	1.112,52	1.517,88	4.167,28	1.004,81	1.248,82	16,81	9,68	17,73
Belanja Barang Jasa Lainnya	1.854,23	306,35	291,34	1.444,62	253,65	252,78	22,09	17,20	13,24
Jumlah/Rata-rata	8.355,12	1.613,12	2.001,47	7.004,75	1.450,36	1.693,85	15,17	9,36	10,32

Sumber: Pengolahan Data Kinerja

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata efisiensi tahun 2019 lebih besar dari tahun 2018 tetapi lebih rendah dari rata-rata efisiensi tahun 2014 – 2018. Efisiensi terbesar tahun 2019 terjadi pada sektor belanja perjalanan dinas yang lebih besar dari efisiensi tahun 2018 dan rata-rata efisiensi tahun 2014 – 2018 (renstra periode 2014 – 2018).

1.3. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Terdapat satu program (**Program Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Daerah**) dengan lima indikator kinerja *outcome* dan 8 kegiatan yang menunjang kinerja indikator ini dengan rata-rata capaian kinerja 100,00% dan capaian kinerja fisik sebesar 100,00%. Capaian ini lebih baik dari capaian pada tahun 2018 yang sebesar 97,95% dan rata-rata capaian renstra 2014 – 2018 yang sebesar 97,75%.

Tabel 3.A.1.4
Capaian Kinerja *Outcome* Priode Renstra Tahun 2014 – 2018 dan Tahun 2019
Program Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Daerah

No.	Program	Indikator Kinerja Outcome	Capaian Kinerja Periode 2014 - 2018		2019	Keterangan
			2014-2018	2018		
76	Program Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Daerah	Tingkat Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Penyusunan APBD Sesuai Prinsip Penganggaran yang Baik	100,00	100,00	100,00	
		Persentase Aparatur Perencanaan Anggaran Perangkat Daerah Mendapatkan Pembinaan Perencanaan Anggaran	100,00	100,00	100,00	
		Persentase Tahapan Penyusunan APBD Tepat Waktu	89,75	89,75	100,00	
		Persentase Pemenuhan Alokasi Anggaran APBD	100,00	100,00	100,00	
		Persentase Konsistensi Perencanaan dengan Penganggaran	99,00	100,00	100,00	
Rata-rata Kinerja			97,75	97,95	100,00	

Sumber: Pengolahan Data Kinerja

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk tahun 2019, dari lima indikator kinerja *outcome* Program Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Daerah yang menunjang kinerja Perda APBD Tahun n+1 Ditetapkan ≤ 31 Desember Tahun n seluruh indikator (100,00%) telah mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini lebih baik dari capaian tahun 2018 dan rata-rata capaian kinerja periode renstra 2014 – 2018 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 program ini telah dilaksanakan secara **efektif dalam mencapai tujuan organisasi**.

Tabel 3.A.1.5
Capaian Kinerja Tahun 2019
Kegiatan Indikator Kinerja Perda APBD Tahun n+1
Ditetapkan ≤ 31 Desember Tahun n

Program	Kegiatan	Kinerja Output			Kinerja Fisik			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
76 Program Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Daerah	1	Penyusunan Perda dan Perbup APBD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	2	Penyusunan Perda dan Perbup PAPBD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	5	Penyusunan Perbup Standar Biaya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	6	Penyusunan Perbup Standar Satuan Harga	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	7	Penyusunan SE Pedoman Penyusunan RKA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	8	Penyusunan KUA PPAS dan KUPAPBD/PPASP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	9	Penyusunan Analisis Standar Belanja	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	10	Penyusunan Perbup tentang kode rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Rata-rata Kinerja					100,00		100,00

Sumber: Pengolahan Data Kinerja



Sedangkan dari 8 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dalam menunjang pencapaian indikator Perda APBD tepat waktu, rata-rata kinerja *output* kegiatan mencapai 100,00%. Capaian fisik kegiatan juga sebesar 100,00% sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 seluruh kegiatan ini telah dilaksanakan secara **efektif dalam mencapai tujuan organisasi**.

2. Indikator Kinerja 2: Opini BPK terhadap LKPD n-1

Untuk tahun 2019 target kinerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja antara Kepala BPKAD Kabupaten Banyuasin dengan Bupati Banyuasin adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Realisasi kinerja indikator ini adalah WTP sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2018 No. 22.B/S-HP/XVIII.PLG/05/2019 tanggal 14 Mei 2019 sehingga capaian kerjanya adalah sebesar **100,00%**.

Tabel 3.A.2.1
Capaian Kinerja Indikator 2:
Opini BPK terhadap LKPD n-1

No	Tahun LKPD	Target Opini	Opini BPK	Capaian Kinerja	Keterangan
1	2013	WTP	WTP	100,00%	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2013 No. 28.B/S-HP/XVIII.PLG/05/2014 tanggal 26 Mei 2014
2	2014	WTP	WTP	100,00%	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2014 No. 23.B/S-HP/XVIII.PLG/05/2015 tanggal 28 Mei 2015
3	2015	WTP	WTP	100,00%	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2015 No. 26.B/S-HP/XVIII.PLG/05/2016 tanggal 27 Mei 2016
4	2016	WTP	WTP	100,00%	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2016 No. 26.B/S-HP/XVIII.PLG/05/2017 tanggal 29 Mei 2017
5	2017	WTP	WTP	100,00%	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2017 No. 26.A/S-HP/XVIII.PLG/05/2018 tanggal 25 Mei 2018
6	2018	WTP	WTP	100,00%	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2018 No. 22.B/S-HP/XVIII.PLG/05/2019 tanggal 14 Mei 2019
Rata-rata Capaian Kinerja				100,00%	

Sumber: Pengolahan Data Kinerja

Dari tabel 3.1 dan tabel 3.2.1 terlihat bahwa capaian kinerja indikator ini pada tahun 2014 – 2018 (renstra periode 2014 – 2018) dan pada tahun 2019 selalu mencapai target yang telah ditetapkan dalam artian bahwa selama periode renstra 2014 – 2018 dan tahun 2019 opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan capaian ke delapan secara berturut-turut sejak tahun 2012.



2.1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2018 No. 22.B/S-HP/XVIII.PLG/05/2019 tanggal 14 Mei 2019, opini WTP diberikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin tanggal 31 Desember 2018 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut di atas, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

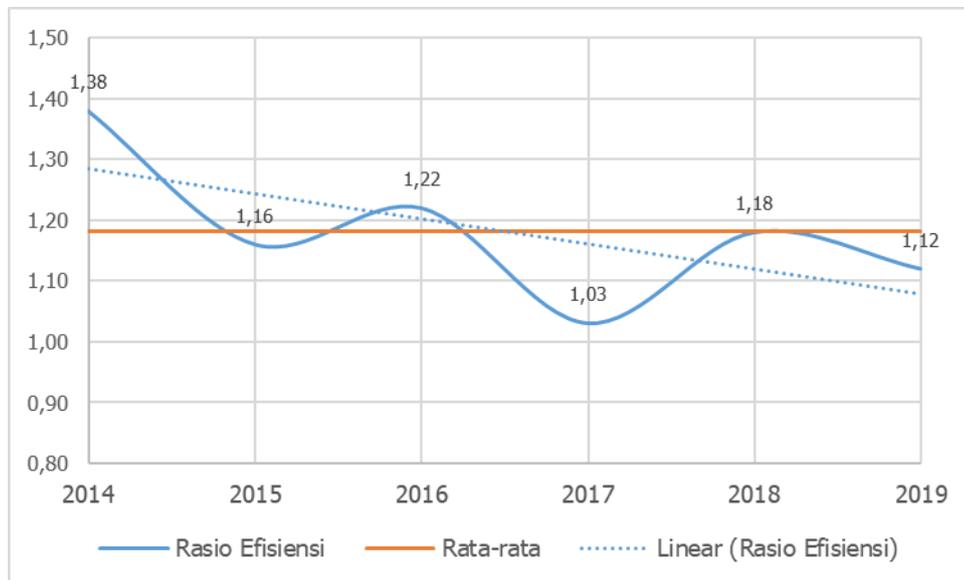
Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja ini yang akan terus dioptimalkan adalah:

1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) semakin baik dan komprehensif.
2. Rekonsiliasi yang dilakukan secara rutin per bulan atas LK SKPD melalui kegiatan monev.
3. Optimalisasi Sistem Teknologi Informasi pengelolaan keuangan melalui aplikasi SIMDA mulai dari penganggaran, penatausahaan dan pelaporan.
4. Optimalisasi Sistem Teknologi Informasi pengelolaan barang milik daerah melalui aplikasi SIMDA BMD dalam hal penatausahaan dan penyajian data sesuai peraturan yang berlaku.
5. Optimalisasi Simda Pendapatan secara *online*, Sismiop dan SimBPHTB dalam pengelolaan pajak daerah.
6. Pembinaan terus menerus untuk meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan dan barang dan Bendahara perangkat daerah Kabupaten Banyuasin.
7. Sistem pengawasan internal yang semakin baik.
8. Capaian indikator kinerja 3 program (*outcome*) yang menjadi tanggung jawab eselon III, terdiri atas 13 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,00%.
9. Capaian indikator kinerja kegiatan (*output*) yang tanggung jawab eselon IV, terdiri atas 26 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,00%.
10. Kinerja fisik program dan kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,00%.

2.2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan penyerapan alokasi anggaran. Untuk indikator kinerja opini BPK terhadap LKPD n-1 tingkat penyerapan anggarannya adalah sebesar 89,67%. Dengan capaian kinerja sebesar 100,00% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator ini adalah $(100,00 : 84,04) = 1 : 1,12$ dalam artian bahwa penggunaan 1 unit anggaran menghasilkan 1,12 unit kinerja.

Gambar 3.A.2.1
Rasio Efisiensi Anggaran Tahun 2014 – 2019
Indikator Kinerja Opini BPK terhadap LKPD n-1



Sumber: Pengolahan Data Kinerja

Dari gambar di atas terlihat *trend* menurun rasio efisiensi ini. Dari sudut pandang lain dapat juga dikatakan bahwa semakin kecil rasio efisiensi menunjukkan semakin baiknya perencanaan anggaran yang dilakukan. Dari sudut pandang ini maka perencanaan anggaran pada tahun 2017 merupakan perencanaan anggaran terbaik selama periode renstra 2014 – 2019. Rasio efisiensi pada tahun 2019 ini lebih rendah daripada rasio tahun 2018 dan rata-rata periode 2014 – 2019. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 1 : 1,38 dan capaian terendah pada tahun 2017 sebesar 1 : 1,03. Efisiensi anggaran terjadi pada tiga komponen belanja utama sebagai sebagaimana tabel 3.2.2 berikut.

Tabel 3.A.2.2
Efisiensi Anggaran Tahun 2014 – 2019
Indikator Kinerja Opini BPK terhadap LKPD n-1

Komponen Belanja	Pagu Anggaran (juta)			Realisasi Anggaran (juta)			Efisiensi Anggaran (%)		
	2014-2018	2018	2019	2014-2018	2018	2019	2014-2018	2018	2019
Belanja Pegawai	5.546,46	961,45	743,77	4.789,97	741,02	624,62	13,64	22,93	16,02
Perjalanan Dinas	9.360,40	2.308,86	2.984,98	7.593,01	2.025,25	2.865,77	18,88	12,28	3,99
Belanja Barang Jasa Lainnya	4.101,36	803,91	1.462,12	3.407,08	674,16	1.164,44	16,93	16,14	20,36
Jumlah/Rata-rata	19.008,23	4.074,21	5.190,87	15.790,06	3.440,42	4.654,83	16,48	17,12	13,46

Sumber: Pengolahan Data Kinerja

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata efisiensi tahun 2019 lebih kecil dari tahun 2018 dan rata-rata efisiensi tahun 2014 – 2018. Efisiensi terbesar tahun 2019 terjadi pada sektor belanja barang jasa lainnya yang lebih besar dari efisiensi tahun 2018 dan rata-rata efisiensi tahun 2014 – 2018 (renstra periode 2014 – 2018).

2.3. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Terdapat 3 program dengan 13 indikator kinerja *outcome* dan 26 kegiatan yang menunjang kinerja indikator ini dengan rata-rata capaian kinerja 100,00% dan capaian kinerja fisik sebesar 100,00%. Capaian ini lebih baik dari capaian pada tahun 2018 yang sebesar 99,93% dan rata-rata capaian renstra 2014 – 2018 yang sebesar 99,89%.

Tabel 3.A.2.3
Capaian Kinerja *Outcome* Priode Renstra Tahun 2014 – 2018 dan Tahun 2019
Program Pendukung Kinerja Opini BPK terhadap LKPD n-1

No.	Program	Indikator Kinerja Outcome	Capaian Kinerja Periode 2014 - 2018		2019	Keterangan
			2014-2018	2018		
77	Program Optimalisasi Penatausahaan Belanja Daerah	Tingkat pemenuhan pedoman/ peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah	100,00	100,00	100,00	
		Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan	100,00	100,00	100,00	
		Persentase penyerapan anggaran APBD	98,36	98,88	100,00	
		Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	
		Persentase kasus TP/TGR selesai diputus TPKD/Majelis TP/TGR (diterbitkan SKTJM/SK Pembebanan/SK Pembebasan)	100,00	100,00	100,00	
		Rata-rata Kinerja Program	99,67	99,78	100,00	
78	Program Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016	100,00	100,00	100,00	
		Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD	100,00	100,00	100,00	
		Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan	100,00	100,00	100,00	
		Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD	100,00	100,00	100,00	
				Rata-rata Kinerja Program	100,00	100,00
79	Program Peningkatan Kualitas Informasi Keuangan Daerah	Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi	100,00	100,00	100,00	
		Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP	100,00	100,00	100,00	
		Persentase Perangkat Daerah yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	
		Persentase Laporan Keuangan disajikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	
				Rata-rata Kinerja Program	100,00	100,00
Rata-rata Kinerja			99,89	99,93	100,00	

Sumber: Pengolahan Data Kinerja

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk tahun 2019, dari 13 indikator kinerja *outcome* program yang menunjang kinerja Opini BPK terhadap LKPD n-1 seluruh indikator (100,00%) telah mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini lebih baik dari capaian tahun 2018 dan rata-rata capaian kinerja periode renstra 2014 – 2018 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 seluruh program ini telah dilaksanakan secara **efektif dalam mencapai tujuan organisasi**.

Tabel 3.A.2.4
Capaian Kinerja Tahun 2019
Kegiatan Indikator Kinerja Opini BPK terhadap LKPD n-1

Program	Kegiatan	Kinerja Output			Kinerja Fisik			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
77 Program Optimalisasi Penatausahaan Belanja Daerah	1	Penyusunan Perbup Pedoman Pelaksanaan APBD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2	Sosialisasi pengelolaan dan penatausahaan belanja daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3	Bimbingan teknis pengelolaan dan penatausahaan belanja daerah	n/a	n/a	n/a	47,50	47,50	100,00
	4	Penyusunan peraturan dan pedoman pengelolaan dan penatausahaan belanja daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5	Manajemen kas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6	Pemutakhiran dan pemeliharaan data gaji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	7	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rata-rata Kinerja Kegiatan Program Program Optimalisasi Penatausahaan Belanja Daerah					100,00		100,00	
78 Program Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Pengendalian dan Penertiban BMD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2	Pembinaan dan Sosialisasi Peraturan Pengelolaan BMD BMD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3	Penyusunan Laporan Semesteran BMD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4	Penyusunan Laporan Akhir Tahun BMD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5	Penyusunan Peraturan pengelolaan BMD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6	Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	7	Pemanfaatan BMD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	8	Penetapan Status Penggunaan BMD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	9	Mutasi dan Penggunaan BMD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	10	Pengamanan BMD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	11	Penyusunan Laporan Pemeliharaan BMD	n/a	n/a	n/a	47,50	47,50	100,00
	12	Pemindahtanganan dan Pemusnahan BMD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13	Inventarisasi BMD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rata-rata Kinerja Kegiatan Program Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah					100,00		100,00	
79 Program Peningkatan Kualitas Informasi Keuangan Daerah	1	Penyusunan Laporan Berkala Pemerintah Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3	Bimbingan teknis akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4	Monev Penatausahaan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5	Penyusunan Peraturan dan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	n/a	n/a	n/a	47,50	47,50	100,00
	6	Penyusunan Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	7	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Rata-rata Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Kualitas Informasi Keuangan Daerah					100,00		100,00
Rata-rata Kinerja					100,00		100,00	

Sumber: Pengolahan Data Kinerja

Sedangkan dari 26 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dalam menunjang pencapaian indikator Opini BPK terhadap LKPD n-1, rata-rata kinerja *output* kegiatan mencapai 100,00%. Capaian fisik kegiatan juga sebesar 100,00% sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 seluruh kegiatan ini telah dilaksanakan secara **efektif dalam mencapai tujuan organisasi**.

3. Indikator Kinerja 3: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pelayanan

Untuk tahun 2019 target kinerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja antara Kepala BPKAD Kabupaten Banyuasin dengan Bupati Banyuasin adalah sebesar 94,25. Realisasi kinerja indikator ini adalah sebesar 94,86 sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Hasil Survey IKM BPKAD Kabupaten Banyuasin Nomor: 800/97/BPKAD-Sk/2019 tanggal 27 Desember 2019 sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar **100,00%**. Survey tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan dilakukan melalui pemberian kuesioner kepada 150 *stakeholders* BPKAD Kabupaten Banyuasin selama tahun 2019. Terdapat 9 unsur pelayanan yang menjadi objek survey yaitu: persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tariff, produk layanan, kompetensi pelaksanaan, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan serta sarana dan prasarana.

Tabel 3.A.3.1
Capaian Kinerja Indikator 3:
Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pelayanan

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
1	2015	93,25	82,27	88,23	Ketetapan Hasil Survey IKM BPKAD Kabupaten Banyuasin Nomor: 800/2025/BPKAD-Sk/2015 tanggal Desember 2015
2	2016	93,50	93,52	100,00	Ketetapan Hasil Survey IKM BPKAD Kabupaten Banyuasin Nomor: 800/459/BPKAD-Sk/2016 tanggal 30 Desember 2016
3	2017	93,75	89,90	95,89	Ketetapan Hasil Survey IKM BPKAD Kabupaten Banyuasin Nomor: 800/705/BPKAD-Sk/2017 tanggal 11 Desember 2017
4	2018	94,00	94,44	100,00	Ketetapan Hasil Survey IKM BPKAD Kabupaten Banyuasin Nomor: 800/596/BPKAD-Sk/2018 tanggal 21 Desember 2018
5	2019	94,25	94,86	100,00	Ketetapan Hasil Survey IKM BPKAD Kabupaten Banyuasin Nomor: 800/97/BPKAD-Sk/2019 tanggal 27 Desember 2019
Rata-rata Kinerja				96,82	

Sumber: Pengolahan Data Kinerja

Dari tabel 3.1 dan tabel 3.3.1 terlihat bahwa capaian kinerja indikator ini pada tahun 2019 sama dengan capaian kinerja pada tahun 2018 dan lebih baik dari rata-rata capaian renstra 2014 – 2018 yang hanya sebesar 96,03%.

3.1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari sembilan komponen survey, seluruhnya mendapat penilaian yang baik dari responden dengan nilai rata-rata 3,83. Komponen dengan penilaian tertinggi adalah komponen sarana dan prasarana dan penilaian terendah terletak pada komponen kompetensi pelaksana.

Tabel 3.A.3.2
Skor Survey Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pelayanan
Tahun 2015 – 2018 dan Tahun 2019

No	Unsur Pelayanan	2015-2018	2018	2019
1	Persyaratan	3,61	3,83	3,79
2	Prosedur	3,59	3,79	3,81
3	Waktu Pelayanan	3,55	3,83	3,77
4	Biaya/Tarif	3,62	3,77	3,79
5	Produk Layanan	3,65	3,74	3,92
6	Kompetensi Pelaksana	3,58	3,81	3,76
7	Perilaku Pelaksana	3,60	3,85	3,89
8	Penanganan Pengaduan	3,80	3,84	3,79
9	Sarana dan Prasarana	3,71	3,89	3,95
Rata-rata Kinerja		3,64	3,82	3,83

Sumber: Pengolahan Data Kinerja

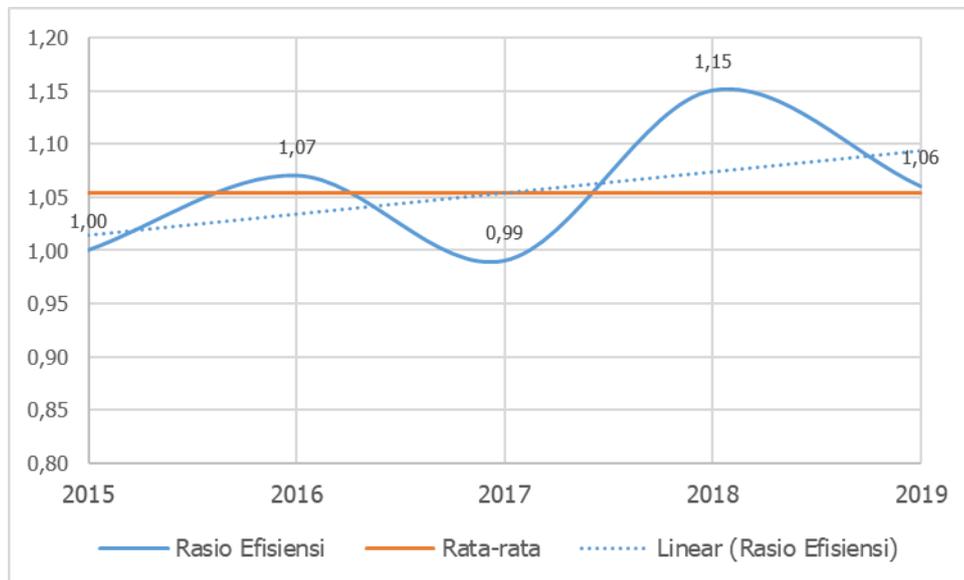
Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja ini yang akan terus dioptimalkan adalah:

1. Semakin meningkatnya tingkat disiplin aparatur.
2. Semakin meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan.
3. Sistem pengawasan internal yang semakin baik.
4. Capaian indikator kinerja 5 program (*outcome*) yang menjadi tanggung jawab eselon III, terdiri atas 8 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,00%.
5. Capaian indikator kinerja kegiatan (*output*) yang tanggung jawab eselon IV, terdiri atas 10 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,00%.
6. Kinerja fisik program dan kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,00%.

3.2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan penyerapan alokasi anggaran. Untuk indikator kinerja tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan tingkat penyerapan anggarannya adalah sebesar 94,11%. Dengan capaian kinerja sebesar 100,00% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator ini adalah $(100,00 : 94,11) = 1 : 1,06$ dalam artian bahwa penggunaan 1 unit anggaran menghasilkan 1,06 unit kinerja. Rasio efisiensi ini merupakan rasio tertinggi untuk periode 2014 – 2019 yang rata-rata capaiannya sebesar 1 : 1,05. Capaian terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 1 : 0,99.

Gambar 3.A.3.1
Rasio Efisiensi Anggaran Tahun 2014 – 2019
Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pelayanan



Sumber: Pengolahan Data Kinerja

Dari gambar di atas terlihat *trend* meningkat rasio efisiensi ini. Dari sudut pandang lain dapat juga dikatakan bahwa semakin kecil rasio efisiensi menunjukkan semakin baiknya perencanaan anggaran yang dilakukan. Dari sudut pandang ini maka perencanaan anggaran pada tahun 2015 merupakan perencanaan anggaran terbaik selama periode renstra 2014 – 2019. Rasio efisiensi pada tahun 2019 ini lebih rendah daripada rasio tahun 2018 dan rata-rata periode 2014 – 2019. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 1 : 1,15 dan capaian terendah pada tahun 2017 sebesar 1 : 0,99. Efisiensi anggaran terjadi pada tiga komponen belanja utama sebagai sebagaimana tabel 3.3.2 berikut.

Tabel 3.A.3.3
Efisiensi Anggaran Tahun 2014 – 2019
Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pelayanan

Komponen Belanja	Pagu Anggaran (juta)			Realisasi Anggaran (juta)			Efisiensi Anggaran (%)		
	2014-2018	2018	2019	2014-2018	2018	2019	2014-2018	2018	2019
Belanja Pegawai	675,65	312,00	279,75	670,10	312,00	279,75	0,82	0,00	0,00
Perjalanan Dinas	2.832,62	119,96	933,53	2.498,72	115,99	931,80	11,79	3,31	0,19
Belanja Barang Jasa Lainnya	4.882,12	1.617,22	1.488,55	4.375,76	1.347,50	1.331,06	10,37	16,68	10,58
Jumlah/Rata-rata	8.390,39	2.049,18	2.701,82	7.544,58	1.775,49	2.542,60	7,66	6,66	3,59

Sumber: Pengolahan Data Kinerja

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata efisiensi tahun 2019 lebih kecil dari tahun 2018 dan rata-rata efisiensi tahun 2014 – 2018. Efisiensi terbesar tahun 2019 terjadi pada sektor belanja barang jasa lainnya tetapi lebih kecil dari efisiensi tahun 2018 dan lebih besar dari rata-rata efisiensi tahun 2014 – 2018 (renstra periode 2014 – 2018).



3.3. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Terdapat 5 program dengan 8 indikator kinerja *outcome* dan 10 kegiatan yang menunjang kinerja indikator ini dengan rata-rata capaian kinerja 100,00% dan capaian kinerja fisik sebesar 100,00%. Capaian ini lebih baik dari capaian pada tahun 2018 yang sebesar 99,91% dan rata-rata capaian renstra 2014 – 2018 yang sebesar 99,87%.

Tabel 3.A.3.4
Capaian Kinerja *Outcome* Priode Renstra Tahun 2014 – 2018 dan Tahun 2019
Program Pendukung Kinerja Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pelayanan

No.	Program	Indikator Kinerja Outcome	Capaian Kinerja Periode 2014 - 2018		2019	Keterangan
			2014-2018	2018		
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Perilaku Aparatur yang Baik	100,00	100,00	100,00	
		Tingkat Kehadiran Aparatur dalam 1 Tahun	100,00	100,00	100,00	
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Kerja Aparatur yang Baik	100,00	100,00	100,00	
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP	100,00	100,00	100,00	
73	Program Optimalisasi dan Peningkatan Pelayanan	Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Pelayanan	96,03	100,00	100,00	
74	Program Peningkatan Maturitas SPIP dan Reformasi Birokrasi	Indeks RB	100,00	100,00	100,00	
		Level Maturitas SPIP	100,00	100,00	100,00	
75	Program Optimalisasi Sistem Teknologi Informasi	Persentase Penyajian Laporan Kinerja dan Keuangan Berbasis IT	100,00	100,00	100,00	
Rata-rata Kinerja			99,50	100,00	100,00	

Sumber: Pengolahan Data Kinerja

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk tahun 2019, dari 13 indikator kinerja *outcome* program yang menunjang kinerja Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pelayanan seluruh indikator (100,00%) telah mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini lebih baik dari capaian tahun 2018 dan rata-rata capaian kinerja periode renstra 2014 – 2018 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 seluruh program ini telah dilaksanakan secara **efektif dalam mencapai tujuan organisasi**.

Tabel 3.A.3.5
Capaian Kinerja Tahun 2019
Kegiatan Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pelayanan

Program	Kegiatan	Kinerja Output			Kinerja Fisik				
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	7	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Disiplin Pegawai	n/a	n/a	n/a	47,50	47,50	100,00
Rata-rata Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Disiplin Aparatur						n/a			100,00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Pendidikan dan pelatihan formal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rata-rata Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						100,00			100,00
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	18	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Akhir Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		26	Penyusunan dan Review Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		30	Penyusunan dan review Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rata-rata Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						100,00			100,00
73	Program Optimalisasi dan Peningkatan Pelayanan	5	Sosialisasi dan Publikasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		9	Fasilitasi dan optimalisasi fungsi UPT. Kecamatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rata-rata Kinerja Kegiatan Program Optimalisasi dan Peningkatan Pelayanan						100,00			100,00
74	Program Peningkatan Maturitas SPIP dan Reformasi Birokrasi	1	Peningkatan maturitas SPIP dan indeks reformasi birokrasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2	Penyusunan Peraturan dan Pedoman Pengembangan Organisasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rata-rata Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Maturitas SPIP dan Reformasi Birokrasi						100,00			100,00
75	Program Optimalisasi Sistem Teknologi Informasi	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Teknologi Informasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rata-rata Kinerja Kegiatan Program Optimalisasi Sistem Teknologi Informasi						100,00			100,00
Rata-rata Kinerja						100,00			100,00

Sumber: Pengolahan Data Kinerja

Sedangkan dari 10 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dalam menunjang pencapaian indikator Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pelayanan, rata-rata kinerja *output* kegiatan mencapai 100,00%. Capaian fisik kegiatan juga sebesar 100,00% sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 seluruh kegiatan ini telah dilaksanakan secara **efektif dalam mencapai tujuan organisasi**.

4. Indikator Kinerja 4: Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah

Untuk tahun 2019 target kinerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja antara Kepala BPKAD Kabupaten Banyuwangi dengan Bupati Banyuwangi adalah sebesar 6,02%. Pengukuran kinerja untuk indikator ini hanya dilakukan sampai dengan triwulan I Tahun 2019 dikarenakan adanya pemekaran organisasi BPKAD Kabupaten Banyuwangi menjadi BPKAD Kabupaten Banyuwangi dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Banyuwangi. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2019 realisasi kinerja indikator ini adalah sebesar 7,68% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar **127,57%**.

Tabel 3.A.4.1
Capaian Kinerja Indikator 4:
Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah

Tahun	PAD (milyar rupiah)			Pendapatan Daerah (milyar rupiah)			Rasio PAD
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
2014	98,61	106,92	108,43	1.783,45	1.726,12	96,79	6,19
2015	95,63	96,22	100,62	1.737,94	1.623,72	93,43	5,93
2016	121,24	104,22	85,96	2.059,02	1.847,01	89,70	5,64
2017	110,16	125,98	114,36	1.904,41	1.880,44	98,74	6,70
2018	121,27	125,96	103,87	1.920,03	1.835,03	95,57	6,86
2019*)	34,26	40,24	117,44	569,15	523,97	92,06	7,68
Jumlah/ Rata-rata	581,17	599,54	103,16	9.974,00	9.436,29	94,61	6,35

*) s.d. Triwulan I Tahun 2019

Sumber: Pengolahan Data Kinerja

Dari tabel 3.1 dan tabel 3.4.1 terlihat bahwa Rasio PAD sampai dengan triwulan I tahun 2019 ini merupakan rasio tertinggi dibandingkan rata-rata capaian renstra 2014 – 2018 yang mencapai 6,27%. Ada dua faktor yang mempengaruhi capaian kinerja indikator ini, pertumbuhan realisasi penerimaan PAD dan pertumbuhan realisasi penerimaan non PAD. Semakin tinggi pertumbuhan penerimaan PAD dibandingkan pertumbuhan penerimaan non PAD akan semakin meningkatkan rasio yang mengindikasikan semakin tingginya tingkat kemandirian daerah. Untuk triwulan I Tahun 2019, pertumbuhan realisasi PAD Kabupaten Banyuasin sebesar 21,95%. Sedangkan pertumbuhan realisasi penerimaan non PAD Kabupaten Banyuasin sebesar 10,35%.

4.1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

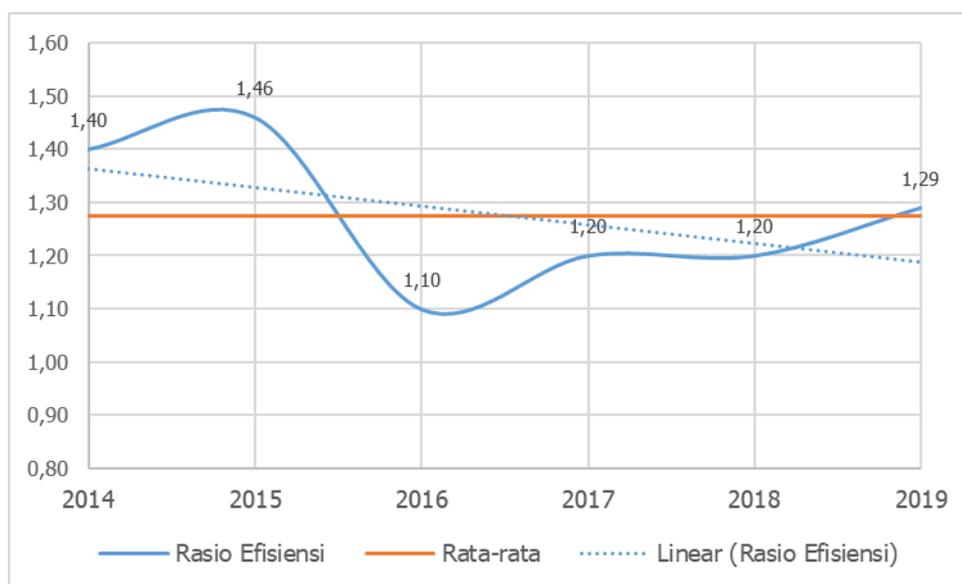
Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja ini adalah:

1. Capaian target penerimaan PAD yang mencapai 117,44% (sampai dengan triwulan I tahun 2019).
2. Pertumbuhan penerimaan PAD yang lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan non PAD (sampai dengan triwulan I tahun 2019).
3. Sistem pengawasan internal yang semakin baik (sampai dengan triwulan I tahun 2019).
4. Capaian indikator kinerja 5 program (*outcome*) yang menjadi tanggung jawab eselon III, terdiri atas 7 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 161,67% (sampai dengan triwulan I tahun 2019).
5. Capaian indikator kinerja kegiatan (*output*) yang tanggung jawab eselon IV, terdiri atas 18 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,00% (sampai dengan triwulan I tahun 2019).
6. Kinerja fisik program dan kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,00% (sampai dengan triwulan I tahun 2019).

4.2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan penyerapan alokasi anggaran. Untuk indikator kinerja rasio PAD terhadap pendapatan daerah tingkat penyerapan anggarannya adalah sebesar 98,71%. Dengan capaian kinerja sebesar 127,57% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator ini adalah $(127,57 : 98,71) = 1 : 1,29$ dalam artian bahwa penggunaan 1 unit anggaran menghasilkan 1,29 unit kinerja.

Gambar 3.A.4.1
Rasio Efisiensi Anggaran Tahun 2014 – 2019
Indikator Kinerja Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah



Sumber: Pengolahan Data Kinerja

Dari gambar di atas terlihat *trend* menurun rasio efisiensi ini. Dari sudut pandang lain dapat juga dikatakan bahwa semakin kecil rasio efisiensi menunjukkan semakin baiknya perencanaan anggaran yang dilakukan. Dari sudut pandang ini maka perencanaan anggaran pada tahun 2015 merupakan perencanaan anggaran terbaik selama periode renstra 2014 – 2019. Rasio efisiensi pada tahun 2019 ini lebih tinggi daripada rasio tahun 2018 dan rata-rata periode 2014 – 2019. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 1 : 1,46 dan capaian terendah pada tahun 2016 sebesar 1 : 1,10. Efisiensi anggaran terjadi pada tiga komponen belanja utama sebagai sebagaimana tabel 3.4.2 berikut.

Tabel 3.A.4.2
Efisiensi Anggaran Tahun 2014 – 2019
Indikator Kinerja Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah

Komponen Belanja	Pagu Anggaran (juta)			Realisasi Anggaran (juta)			Efisiensi Anggaran (%)		
	2014-2018	2018	2019	2014-2018	2018	2019	2014-2018	2018	2019
Belanja Pegawai	824,01	529,09	265,33	700,87	505,56	251,45	14,94	4,45	5,23
Perjalanan Dinas	1.611,13	1.537,89	1.356,90	1.383,35	1.433,02	1.343,01	14,14	6,82	1,02
Belanja Barang Jasa Lainnya	4.731,52	1.473,00	531,67	4.040,52	1.247,70	531,67	14,60	15,30	0,00
Jumlah/Rata-rata	7.166,65	3.539,98	2.153,89	6.124,74	3.186,28	2.126,13	14,56	8,85	2,08

Sumber: Pengolahan Data Kinerja

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata efisiensi tahun 2019 lebih kecil dari tahun 2018 dan rata-rata efisiensi tahun 2014 – 2018. Efisiensi terbesar tahun 2019 terjadi pada sektor belanja barang jasa lainnya tetapi lebih kecil dari efisiensi tahun 2018 dan dari rata-rata efisiensi tahun 2014 – 2018 (renstra periode 2014 – 2018).

4.3. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Terdapat 5 program dengan 7 indikator kinerja *outcome* dan 18 kegiatan yang menunjang kinerja indikator ini dengan rata-rata capaian kinerja 161,67% dan capaian kinerja fisik sebesar 100,00%. Capaian ini lebih baik dari capaian pada tahun 2018 yang sebesar 115,22% dan rata-rata capaian renstra 2014 – 2018 yang sebesar 114,41%.

Tabel 3.A.4.3
Capaian Kinerja *Outcome* Priode Renstra Tahun 2014 – 2018 dan Tahun 2019
Program Pendukung Kinerja Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah

No.	Program	Indikator Kinerja Outcome	Capaian Kinerja Periode 2014 - 2018		2019	Keterangan
			2014-2018	2018		
70	Program Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Pajak Daerah	Persentase Ketetapan Pajak Daerah Dibayar Sebelum Jatuh Tempo	89,91	81,37	100,00	
		Persentase Tunggakan Ketetapan Pajak Daerah Berhasil Ditagih (Dipungut)	96,87	95,09	100,00	
80	Program Optimalisasi Potensi Pajak Daerah dan PAD Lainnya	Pertumbuhan Objek PAD Terdaftar	n/a	n/a	n/a	
81	Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah non PBB dan BPHTB	Pertumbuhan Pajak Daerah non PBB dan BPHTB	155,86	153,27	539,27	
82	Program Optimalisasi Pengelolaan PBB dan BPHTB	Pertumbuhan PBB dan BPHTB	158,54	176,19	5,90	
83	Program Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Lainnya	Capaian Target Penerimaan PAD non Pajak Daerah	90,45	89,45	134,40	
		Capaian Target Penerimaan non PAD	94,85	95,97	90,44	
Rata-rata Kinerja			114,41	115,22	161,67	

Sumber: Pengolahan Data Kinerja

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk tahun 2019, dari 7 indikator kinerja *outcome* program yang menunjang kinerja Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah, 5 indikator (71,43%) telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan dan 2 indikator (28,57%) belum mencapai target yang ditetapkan. Rata-rata capaian sampai dengan triwulan I ini lebih baik dari capaian tahun 2018 dan rata-rata capaian kinerja periode renstra 2014 – 2018 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019, 3 program (60,00%) telah dilaksanakan secara **efektif dalam mencapai tujuan organisasi** dan 2 program (40,00%) **belum efektif dalam mencapai tujuan organisasi**.

Tetapi walaupun demikian hal ini belum dapat menggambarkan kinerja sesungguhnya keseluruhan program tersebut yang baru pada triwulan IV tahun 2019 akan dilakukan pengukuran kinerjanya secara menyeluruh. **Kinerja triwulan II sampai dengan triwulan IV tahun 2019 menjadi target kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin.**

Tabel 3.A.4.4
Capaian Kinerja Tahun 2019
Kegiatan Indikator Kinerja Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah

Program	Kegiatan	Kinerja Output			Kinerja Fisik		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
70 Program Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Pajak Daerah	11 Penagihan Tunggakan Pajak Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	12 Verifikasi dan Pemeriksaan Pajak Daerah non PBB dan BPHTB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13 Verifikasi dan Pemeriksaan PBB dan BPHTB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	14 Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	15 Pekan Panutan Pajak Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rata-rata Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Pajak Daerah				100,00		100,00	
80 Program Optimalisasi Potensi Pajak Daerah dan PAD Lainnya	1 Kajian Potensi Pajak Daerah dan PAD Lainnya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2 Pendataan, Pemutakhiran Data dan Pendaftaran Pajak Daerah non PBB dan BPHTB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3 Pendataan, Pemutakhiran Data dan Pendaftaran PBB dan BPHTB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rata-rata Kinerja Kegiatan Program Optimalisasi Potensi Pajak Daerah dan PAD Lainnya				100,00		100,00	
81 Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah non PBB dan BPHTB	1 Penyusunan Peraturan Pengelolaan Pajak Daerah non PBB dan BPHTB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2 Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah non PBB dan BPHTB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3 Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi Pajak Daerah non PBB dan BPHTB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rata-rata Kinerja Kegiatan Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah non PBB dan BPHTB				100,00		100,00	
82 Program Optimalisasi Pengelolaan PBB dan BPHTB	1 Penyusunan Peraturan Pengelolaan PBB dan BPHTB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2 Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3 Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi PBB dan BPHTB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4 Cetak Massal dan Distribusi Ketetapan PBB dan BPHTB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rata-rata Kinerja Kegiatan Program Optimalisasi Pengelolaan PBB dan BPHTB				100,00		100,00	
83 Program Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Lainnya	1 Optimalisasi dana transfer pusat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2 Optimalisasi dana transfer provinsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3 Monitoring dan Evaluasi PAD Lainnya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rata-rata Kinerja Kegiatan Program Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Lainnya				100,00		100,00	
Rata-rata Kinerja				100,00		100,00	

Sumber: Pengolahan Data Kinerja

Sedangkan dari 18 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dalam menunjang pencapaian indikator Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah, rata-rata kinerja *output* kegiatan mencapai 100,00%. Capaian fisik kegiatan juga sebesar 100,00% sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 seluruh kegiatan ini telah dilaksanakan secara **efektif dalam mencapai tujuan organisasi**.

5. KINERJA SKPKD/PPKD

Selain terget kinerja sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan Bupati Banyuasin, Kepala BPKAD Kabupaten Banyuasin juga bertindak selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang secara otomatis bertindak selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11), (15) dan (16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Permendagri 59/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka selaku PPKD Kepala BPKAD Kabupaten Banyuasin harus melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam RKA PPKD yang meliputi:

- a. Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah
- b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah.-belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga
- c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah

Untuk tahun 2019 terdapat 3 komponen pokok dalam DPA PPKD yang menjadi kinerja Kepala BPKAD Kabupaten Banyuasin selaku PPKD, yaitu: Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

5.1. Pendapatan

Untuk tahun 2019 target pendapatan yang menjadi kinerja PPKD sejumlah Rp2.041.147.892.805,00 dan berhasil dicapai sebesar Rp2.187.087.729.794,22 atau 98,47%.

Tabel 3.A.5.1.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah (PPKD) Tahun 2019

Uraian	Target	Realisasi	%
PENDAPATAN	2.221.072.823.111,17	2.187.087.729.794,22	98,47
DANA PERIMBANGAN	1.616.274.719.742,00	1.570.280.388.887,00	97,15
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	257.925.021.742,00	225.889.058.449,00	87,58
Dana Alokasi Umum	975.360.613.000,00	975.360.613.000,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	382.989.085.000,00	369.030.717.438,00	96,36
LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	604.798.103.369,17	616.807.340.907,22	101,99
Pendapatan Hibah	100.513.992.497,00	79.242.624.715,00	78,84
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	95.658.586.434,00	151.007.901.431,46	157,86
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.281.887.000,00	35.281.887.000,00	100,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	73.429.099.438,17	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	299.914.538.000,00	351.274.927.760,76	117,13

Sumber: Pengolahan LRA Tahun 2019

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 8 sektor penerimaan, terdapat 4 sektor (50,00%) yang realisasi penerimaannya tidak mencapai target. Hal ini disebabkan beberapa faktor sebagai berikut:

1. Tidak disalurkannya dana bagi hasil bukan pajak triwulan IV.
2. Penyaluran Dana Alokasi Khusus berdasarkan nilai kontrak dan bukan berdasarkan alokasi anggaran.
3. Terdapat kesalahan penganggaran pada bantuan keuangan provinsi yang seharusnya masuk ke dana bagi hasil pajak provinsi.



5.2. Belanja

Untuk tahun 2019 target penyaluran anggaran yang menjadi kinerja PPKD sejumlah Rp454.626.556.738,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp446.155.209.789,61 atau 98,14%.

Alokasi belanja hibah didasarkan kepada:

1. Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 76/KPTS/II/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Berupa Uang Tahun Anggaran 2019.
2. Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 724/KPTS/II/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 76/KPTS/II/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Berupa Uang Tahun Anggaran 2019.
3. Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 469/KPTS/DISDIKBUD/2019 tanggal 18 Juni 2019 tentang Penetapan Kelompok Bermain/Taman Kanak-kanak Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2019.
4. Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 866/KPTS/DISDIKBUD/2019 tanggal 04 November 2019 tentang Penetapan Kelompok Bermain/Taman Kanak-kanak Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahap II Tahun Anggaran 2019.
5. Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 395/KPTS/DISDIKBUD/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Penetapan Bantuan Dana Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C Tahun Anggaran 2019.
6. Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 865/KPTS/DISDIKBUD/2019 tanggal 04 November 2019 tentang Penetapan Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C Tahap II Tahun Anggaran 2019.

Alokasi belanja bantuan keuangan didasarkan pada:

1. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Prioritas Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
2. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan kepada Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
3. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 168 Tahun 2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 11 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan kepada Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
4. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 782 Tahun 2014 tanggal 24 Oktober 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
5. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 161 Tahun 2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.



Alokasi Belanja Tidak Terduga didasarkan kepada:

1. Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 100/KPTS/BPKAD/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019 untuk Pengembalian Setoran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuasin.
2. Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 106/KPTS/BPKAD/2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019 untuk Pengembalian Setoran Dana Jaminan Kesungguhan PT. Sumber Alam Makmur Utama kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 781/KPTS/BPKAD/2019 tanggal 04 Oktober 2019 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019 untuk Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Banyuasin.

Alokasi Penyertaan Modal didasarkan kepada Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 394/KPTS/BPKAD/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Penetapan Alokasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada Bank Sumselbabel Cabang Pangkalan Balai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.

Tabel 3.A.5.2
Target dan Realisasi Belanja Daerah (PPKD) Tahun 2019

Uraian	Target	Realisasi	%
BELANJA	454.626.556.738,00	446.155.209.789,61	98,14
BELANJA TIDAK LANGSUNG	454.626.556.738,00	446.155.209.789,61	98,14
Belanja Bunga	1.600.000.000,00	1.591.500.000,00	99,47
Belanja Hibah	23.112.600.000,00	21.765.800.000,00	94,17
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Partai Politik	424.628.901.600,00	421.482.773.539,61	99,26
Belanja Tidak Terduga	5.285.055.138,00	1.315.136.250,00	24,88

Sumber: Pengolahan LRA Tahun 2019

Dari tabel di atas terlihat bahwa seluruh sektor belanja PPKD tidak satu pun yang mencapai realisasi 100,00% yang disebabkan beberapa faktor sebagai berikut:

7. Terdapat selisih pagu anggaran yang dilaporkan manual bendahara dengan pagu di kartu kendali bendahara sehingga menyebabkan selisih anggaran.
8. Tidak diajukannya permohonan pencairan hibah sampai dengan batas waktu sebagaimana diatur dalam surat edaran Bupati Banyuasin Nomor: 900/1647/BPKAD-Sekr/2019 tanggal 16 Desember 2019.

Tabel 3.A.5.3
Target dan Realisasi Penyaluran Belanja Daerah (PPKD) Tahun 2019

Jenis Belanja PPKD	Target		Realisasi		%	
	Anggaran	Penerima	Anggaran	Penerima	Anggaran	Penerima
Belanja Bunga	1.600.000.000,00	1,00	1.591.500.000,00	1,00	99,47	100,00
Belanja Hibah	23.112.600.000,00	1.050,00	21.765.800.000,00	1.027,00	94,17	97,81
Hibah Kepada Pemerintah Pusat	2.300.000.000,00	6,00	2.300.000.000,00	6,00	100,00	100,00
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	5.241.000.000,00	22,00	4.863.000.000,00	21,00	92,79	95,45
Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Dengan Kegiatan Bidang Pendidikan	13.541.600.000,00	894,00	12.682.800.000,00	891,00	93,66	99,66
Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Dengan Kegiatan Bidang Keagamaan	2.030.000.000,00	128,00	1.920.000.000,00	109,00	94,58	85,16
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota/Pem Desa/Partai Politik	424.129.401.599,61	1.752,00	420.983.273.539,61	1.746,00	99,26	99,66
ADD Tahap 1	47.682.831.800,00	288,00	47.682.831.800,00	288,00	100,00	100,00
ADD Tahap 2	38.146.265.440,00	288,00	38.146.265.440,00	288,00	100,00	100,00
ADD Tahap 3	36.999.466.359,61	288,00	36.999.466.359,61	288,00	100,00	100,00
Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa	500.000,00	1,00	500.000,00	1,00	100,00	100,00
Dana Desa Tahap 1	59.982.907.600,00	288,00	59.982.907.600,00	288,00	100,00	100,00
Dana Desa Tahap 2	119.965.815.200,00	288,00	119.502.753.865,00	287,00	99,61	99,65
Dana Desa Tahap 3	119.965.815.200,00	288,00	117.392.601.641,00	283,00	97,86	98,26
Bantuan Kepada Partai Politik Periode Tahun 2014-2019 dan 2019-2024	1.385.800.000,00	23,00	1.275.946.834,00	23,00	92,07	100,00
Belanja Tidak Terduga	5.285.055.138,00	0,00	1.315.136.250,00	4,00	24,88	100,00
Jumlah	452.527.056.737,61	2.802,00	444.064.209.789,61	2.777,00	98,13	99,11

Sumber: Pengolahan LRA Tahun 2019

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 12 komponen belanja PPKD terdapat 4 komponen (33,33%) yang penyalurannya belum mencapai 100,00%. Hal ini disebabkan memang terdapat 5 desa yang tidak disalurkan karena kurangnya persyaratan yang harus dipenuhi untuk pencairan Dana Desa.

Tabel 3.A.5.4
Penyampaian Pertanggungjawaban (SPJ) oleh Penerima

Jenis Belanja PPKD	Jumlah Penerima	Jumlah SPJ	%
Belanja Hibah	1.027,00	528,00	51,41
Hibah Kepada Pemerintah Pusat	6,00	6,00	100,00
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	21,00	15,00	71,43
Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Dengan Kegiatan Bidang Pendidikan	891,00	467,00	52,41
Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Dengan Kegiatan Bidang Keagamaan	109,00	40,00	36,70
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota/Pem Desa/Partai Politik	23,00	23,00	100,00
Bantuan Kepada Partai Politik Periode Tahun 2014-2019 dan 2019-2024	23,00	23,00	100,00
Jumlah	1.050,00	551,00	52,48

Sumber: Pengolahan Data PPKD

Dari tabel di atas terlihat bahwa baru 52,48% penerima hibah dan bantuan yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada BPKAD Kabupaten Banyuasin. BPKAD Kabupaten Banyuasin telah menyampaikan surat kepada penerima hibah melalui OPD yang melakukan verifikasi/evaluasi atas usulan bantuan hibah tahun anggaran 2019 melalui:



1. Surat Bupati Banyuasin Nomor 900/2943/BPKAD-Sekre/2019 tanggal 12 November 2019.
2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 900/114/BPKAD-Sekre/2020 tanggal 24 Januari 2020.

B. REALISASI KEUANGAN

Secara keseluruhan realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian kinerja indikator kinerja utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin pada tahun 2019 mencapai 91,45%. Realisasi ini lebih tinggi dari realisasi pada tahun 2018 yang sebesar 87,37% dan dari rata-rata realisasi periode renstra 2014 – 2018 yang mencapai 85,20%. Realisasi anggaran tahun 2019 ini juga di atas target penyerapan anggaran Kabupaten Banyuasin yang ditetapkan sebesar 90,00%.

Tabel 3.B.1
Target dan Realisasi Keuangan Tahun 2014 – 2018 dan Tahun 2019

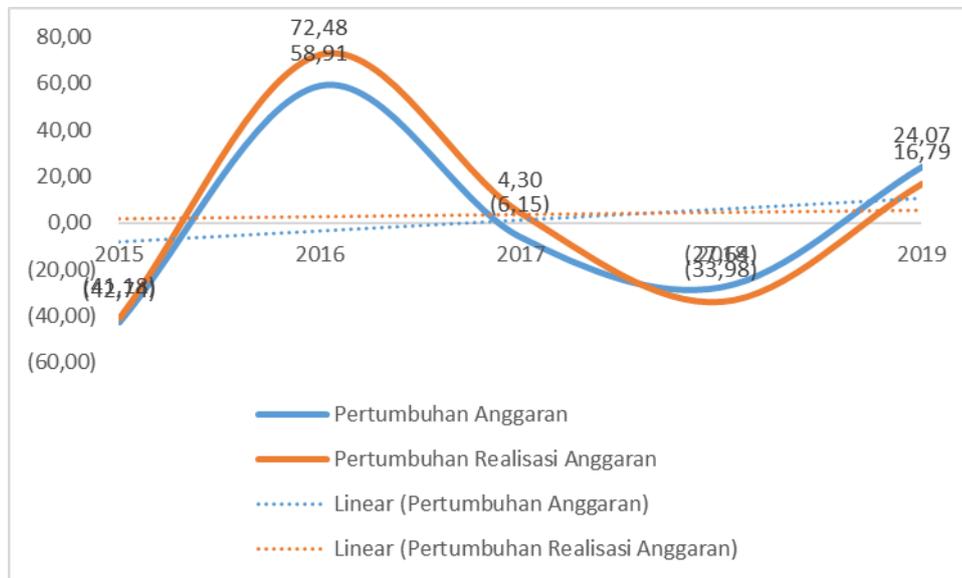
No.	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Juta)			Realisasi Anggaran (Juta)			Capaian (%)		
		2014 - 2018	2018	2019	2014 - 2018	2018	2019	2014 - 2018	2018	2019
1	Perda APBD Tahun n+1 Ditetapkan ≤ 31 Desember Tahun n	1.671,02	1.613,12	2.001,47	1.400,95	1.450,36	1.693,85	83,84	89,91	84,63
2	Opini BPK terhadap LKPD n-1	3.831,65	4.074,21	5.190,87	3.181,77	3.440,42	4.654,83	83,04	84,44	89,67
3	Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pelayanan	1.678,08	2.049,18	2.701,82	1.508,92	1.775,49	2.542,60	89,92	86,64	94,11
4	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	7.250,74	3.539,98	2.153,89	6.204,58	3.186,28	2.126,13	85,57	90,01	98,71
Jumlah/Rata-rata		14.431,48	11.276,49	12.048,06	12.296,21	9.852,56	11.017,41	85,20	87,37	91,45

Sumber: Pengolahan Data Kinerja

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 4 indikator kinerja tahun 2019, terdapat 2 indikator kinerja (50,00%) yang realisasi anggarannya di bawah 90,00% atau di bawah target penyerapan anggaran kabupaten. Kondisi ini disebabkan:

3. Honorarium ASN yang tidak dibayarkan mengacu Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
4. Efisiensi belanja perjalanan dinas menindaklanjuti arahan Kepala BPKAD Kabupaten Banyuasin tentang penerbitan SPD secara selektif.

Gambar 3.B.1
Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Anggaran
Tahun 2015 – 2018 dan Tahun 2019



Sumber: Pengolahan Data Kinerja

Dari segi pertumbuhan anggaran, pertumbuhan alokasi anggaran pada tahun 2019 sebesar 24,07%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari pertumbuhan anggaran tahun 2018 yang bersifat negatif sebesar (27,64%) dan rata-rata pertumbuhan anggaran periode renstra 2014 – 2018 yang bersifat negatif sebesar (4,40%) dengan *trend* meningkat.

Dari segi pertumbuhan realisasi anggaran, pertumbuhan pada tahun 2019 sebesar 16,79%, lebih tinggi dari pertumbuhan pada tahun 2018 yang bersifat negatif sebesar (33,98%) dan dari rata-rata pertumbuhan periode renstra 2014 – 2018 yang sebesar 0,41% dengan *trend* meningkat.

1. Indikator Kinerja 1: Perda APBD Tahun n+1 Ditetapkan ≤ 31 Desember Tahun n

Realisasi keuangan indikator kinerja Perda APBD Tahun n+1 Ditetapkan ≤ 31 Desember Tahun n mencapai 84,63%. Capaian ini lebih rendah dari capaian tahun 2018 yang sebesar 89,91% tetapi lebih baik dari rata-rata capaian renstra 2014 – 2018 yang hanya sebesar 83,84%.

Tabel 3.B.1.1
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2019
Program Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Daerah

Program	Kegiatan	Anggaran			
		Pagu	Realisasi	Capaian	
76 Program Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Daerah	1 Penyusunan Perda dan Perbup APBD	856.190.430,82	680.414.200,00	79,47	
	2 Penyusunan Perda dan Perbup P APBD	415.731.315,00	406.820.825,00	97,86	
	5 Penyusunan Perbup Standar Biaya	110.445.000,00	105.665.528,00	95,67	
	6 Penyusunan Perbup Standar Satuan Harga	208.010.000,00	167.992.399,00	80,76	
	7 Penyusunan SE Pedoman Penyusunan RKA	131.810.000,00	69.154.447,00	52,47	
	8 Penyusunan KUA PPAS dan KUP APBD/PPASP	247.053.400,00	231.570.545,00	93,73	
	9 Penyusunan Analisis Standar Belanja	23.716.200,00	23.716.200,00	100,00	
	10 Penyusunan Perbup tentang kode rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan	8.515.000,00	8.515.000,00	100,00	
	Jumlah		2.001.471.345,82	1.693.849.144,00	84,63

Sumber: Pengolahan Data Kinerja

Dari tabel di atas terlihat bahwa penyerapan anggaran Program Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Daerah masih di bawah 90,00% dan terdapat 3 kegiatan (37,50%) dengan penyerapan anggaran di bawah 90,00%. Kondisi terjadi disebabkan:

1. Honorarium ASN yang tidak dibayarkan mengacu Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
2. Efisiensi belanja perjalanan dinas menindaklanjuti arahan Kepala BPKAD Kabupaten Banyuasin tentang penerbitan SPD secara selektif.

2. Indikator Kinerja 2: Opini BPK terhadap LKPD n-1

Realisasi keuangan indikator kinerja Opini BPK terhadap LKPD n-1 yang terdiri atas 3 Program mencapai 89,67%. Capaian ini lebih tinggi dari capaian tahun 2018 yang sebesar 84,44% dan dari rata-rata capaian renstra 2014 – 2018 yang hanya sebesar 83,04%.

Tabel 3.B.2.1
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2019
Program Pendukung Kinerja Opini BPK terhadap LKPD n-1

Program	Kegiatan	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
77 Program Optimalisasi Penatausahaan Belanja Daerah	1 Penyusunan Perbup Pedoman Pelaksanaan APBD	107.935.000,00	107.225.055,00	99,34
	2 Sosialisasi pengelolaan dan penatausahaan belanja daerah	159.165.000,00	144.585.200,00	90,84
	3 Bimbingan teknis pengelolaan dan penatausahaan belanja daerah	0,00	0,00	n/a
	4 Penyusunan peraturan dan pedoman pengelolaan dan penatausahaan belanja daerah	632.424.000,00	631.673.740,00	99,88
	5 Manajemen kas	582.199.766,39	464.156.173,00	79,72
	6 Pemutakhiran dan pemeliharaan data gaji	515.180.352,00	487.772.200,00	94,68
	7 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	268.365.000,00	248.651.656,00	92,65
Jumlah		2.265.269.118,39	2.084.064.024,00	92,00
78 Program Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Pengendalian dan Penertiban BMD	162.139.300,00	107.065.800,00	66,03
	2 Pembinaan dan Sosialisasi Peraturan Pengelolaan BMD BMD	322.576.000,00	302.108.600,00	93,66
	3 Penyusunan Laporan Semesteran BMD	47.200.000,00	47.000.000,00	99,58
	4 Penyusunan Laporan Akhir Tahun BMD	89.300.000,00	86.113.000,00	96,43
	5 Penyusunan Peraturan pengelolaan BMD	76.637.000,00	75.901.400,00	99,04
	6 Penyusunan RKBM dan RKPBM	40.797.000,00	39.380.400,00	96,53
	7 Pemanfaatan BMD	93.720.000,00	63.388.075,00	67,64
	8 Penetapan Status Penggunaan BMD	12.800.000,00	9.455.200,00	73,87
	9 Mutasi dan Penggunaan BMD	70.614.100,00	63.280.431,00	89,61
	10 Pengamanan BMD	59.195.000,00	49.930.400,00	84,35
	11 Penyusunan Laporan Pemeliharaan BMD	0,00	0,00	n/a
	12 Pemindahtanganan dan Pemusnahan BMD	150.650.000,00	84.945.000,00	56,39
	13 Inventarisasi BMD	171.618.300,00	141.082.025,00	82,21
Jumlah		1.297.246.700,00	1.069.650.331,00	82,46
79 Program Peningkatan Kualitas Informasi Keuangan Daerah	1 Penyusunan Laporan Berkala Pemerintah Daerah	417.073.000,00	335.632.900,00	80,47
	3 Bimbingan teknis akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	207.536.400,00	189.344.800,00	91,23
	4 Monev Penatausahaan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	283.426.600,00	276.733.000,00	97,64
	5 Penyusunan Peraturan dan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	0,00	0,00	n/a
	6 Penyusunan Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	160.116.400,00	154.338.900,00	96,39
	7 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	560.206.037,09	545.067.022,00	97,30
	Jumlah		1.628.358.437,09	1.501.116.622,00
Total		5.190.874.255,48	4.654.830.977,00	89,67

Sumber: Pengolahan Data Kinerja

Dari tabel di atas terlihat terdapat 3 kegiatan dalam 3 program yang alokasi anggarannya dialihkan ke kegiatan lain yang lebih prioritas dengan tidak mengurangi target kinerja program yang telah ditetapkan. Selain itu terdapat 1 program (33,33%) yang penyerapan anggarannya masih di bawah 90,00% dan terdapat 9 kegiatan (34,62%) dengan penyerapan anggaran di bawah 90,00%. Kondisi terjadi disebabkan:

1. Honorarium ASN yang tidak dibayarkan mengacu Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
2. Efisiensi belanja perjalanan dinas menindaklanjuti arahan Kepala BPKAD Kabupaten Banyuasin tentang penerbitan SPD secara selektif.

3. Indikator Kinerja 3: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pelayanan

Realisasi keuangan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pelayanan yang terdiri atas 3 Program mencapai 94,11%. Capaian ini lebih tinggi dari capaian tahun 2018 yang sebesar 84,44% dan dari rata-rata capaian renstra 2014 – 2018 yang hanya sebesar 83,04%.

Tabel 3.B.3.1
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2019
Program Pendukung Kinerja Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pelayanan

Program		Kegiatan		Anggaran		
				Pagu	Realisasi	Capaian
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	7	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Disiplin Pegawai	0,00	0,00	n/a
Jumlah				0,00	0,00	n/a
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Pendidikan dan pelatihan formal	882.195.000,00	837.399.350,00	94,92
Jumlah				882.195.000,00	837.399.350,00	94,92
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	18	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Akhir Tahun	122.130.000,00	120.723.017,00	98,85
		26	Penyusunan dan Review Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	51.870.000,00	51.813.653,00	99,89
		30	Penyusunan dan review Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	86.520.000,00	86.178.600,00	99,61
Jumlah				260.520.000,00	258.715.270,00	99,31
73	Program Optimalisasi dan Peningkatan Pelayanan	5	Sosialisasi dan Publikasi	102.500.000,00	102.500.000,00	100,00
		9	Fasilitasi dan optimalisasi fungsi UPT. Kecamatan	123.048.800,00	123.048.800,00	100,00
Jumlah				225.548.800,00	225.548.800,00	100,00
74	Program Peningkatan Maturitas SPIP dan Reformasi Birokrasi	1	Peningkatan maturitas SPIP dan indeks reformasi birokrasi	68.490.000,00	68.488.417,00	100,00
		2	Penyusunan Peraturan dan Pedoman Pengembangan Organisasi	30.120.000,00	19.049.663,00	63,25
Jumlah				98.610.000,00	87.538.080,00	88,77
75	Program Optimalisasi Sistem Teknologi Informasi	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Teknologi Informasi	1.234.950.000,00	1.133.400.000,00	91,78
Jumlah				1.234.950.000,00	1.133.400.000,00	91,78
Total				2.701.823.800,00	2.542.601.500,00	94,11

Sumber: Pengolahan Data Kinerja

Dari tabel di atas terlihat terdapat 1 kegiatan dalam 1 program yang alokasi anggarannya dialihkan ke kegiatan lain yang lebih prioritas dengan tidak mengurangi target kinerja program yang telah ditetapkan. Selain itu terdapat 1 program (16,67%) yang penyerapan anggarannya masih di bawah 90,00% dan terdapat 1 kegiatan (10,00%) dengan penyerapan anggaran di bawah 90,00%. Kondisi terjadi disebabkan:

1. Honorarium ASN yang tidak dibayarkan mengacu Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
2. Efisiensi belanja perjalanan dinas menindaklanjuti arahan Kepala BPKAD Kabupaten Banyuasin tentang penerbitan SPD secara selektif.

4. Indikator Kinerja 4: Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah

Realisasi keuangan indikator kinerja Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah yang terdiri atas 5 Program mencapai 98,71%. Capaian ini lebih tinggi dari capaian tahun 2018 yang sebesar 90,01% dan dari rata-rata capaian renstra 2014 – 2018 yang hanya sebesar 85,57%.

Tabel 3.B.4.1
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2019
Program Pendukung Kinerja Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah

Program	Kegiatan	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
70 Program Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Pajak Daerah	11 Penagihan Tunggakan Pajak Daerah	196.685.018,00	196.685.018,0000	100,00
	12 Verifikasi dan Pemeriksaan Pajak Daerah non PBB dan BPHTB	55.675.600,00	55.675.600,00	100,00
	13 Verifikasi dan Pemeriksaan PBB dan BPHTB	56.337.589,00	56.337.589,00	100,00
	14 Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah	72.459.636,0000	72.459.636,00	100,00
	15 Pekan Panutan Pajak Daerah	126.531.200,00	126.531.200,00	100,00
Jumlah		507.689.043,00	507.689.043,00	100,00
80 Program Optimalisasi Potensi Pajak Daerah dan PAD Lainnya	1 Kajian Potensi Pajak Daerah dan PAD Lainnya	57.527.600,00	57.527.600,00	100,00
	2 Pendaftaran, Pemutakhiran Data dan Pendaftaran Pajak Daerah non PBB dan BPHTB	203.321.800,00	203.321.800,00	100,00
	3 Pendaftaran, Pemutakhiran Data dan Pendaftaran PBB dan BPHTB	1.560.000,00	1.560.000,00	100,00
Jumlah		262.409.400,00	262.409.400,00	100,00
81 Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah non PBB dan BPHTB	1 Penyusunan Peraturan Pengelolaan Pajak Daerah non PBB dan BPHTB	19.409.173,00	19.409.173,00	100,00
	2 Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah non PBB dan BPHTB	64.829.857,00	64.829.857,00	100,00
	3 Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi Pajak Daerah non PBB dan BPHTB	45.453.600,00	45.453.600,00	100,00
Jumlah		129.692.630,00	129.692.630,00	100,00
82 Program Optimalisasi Pengelolaan PBB dan BPHTB	1 Penyusunan Peraturan Pengelolaan PBB dan BPHTB	49.015.389,00	49.015.389,00	100,00
	2 Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB	111.613.974,00	97.736.774,00	87,57
	3 Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi PBB dan BPHTB	160.517.800,00	146.626.700,00	91,35
	4 Cetak Massal dan Distribusi Ketetapan PBB dan BPHTB	718.638.140,00	718.638.140,00	100,00
Jumlah		1.039.785.303,00	1.012.017.003,00	97,33
83 Program Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Lainnya	1 Optimalisasi dana transfer pusat	208.187.700,00	208.187.700,00	100,00
	2 Optimalisasi dana transfer provinsi	4.869.800,00	4.869.800,00	100,00
	3 Monitoring dan Evaluasi PAD Lainnya	1.260.000,00	1.260.000,00	100,00
Jumlah		214.317.500,00	214.317.500,00	100,00
Total		2.153.893.876,00	2.126.125.576,00	98,71

Sumber: Pengolahan Data Kinerja

Dari tabel di atas terlihat terdapat 1 kegiatan (5,56%) dengan penyerapan anggaran di bawah 90,00%. Kondisi terjadi disebabkan:

- Honorarium ASN yang tidak dibayarkan mengacu Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
- Efisiensi belanja perjalanan dinas menindaklanjuti arahan Kepala BPKAD Kabupaten Banyuasin tentang penerbitan SPD secara selektif.

C. INOVASI DAN PENGHARGAAN

Selama tahun 2019 terdapat beberapa kegiatan bersifat inovasi yang telah dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kinerja mendukung visi dan misi Bupati Banyuasin sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 – 2023. Inovasi yang telah dilakukan tersebut adalah:

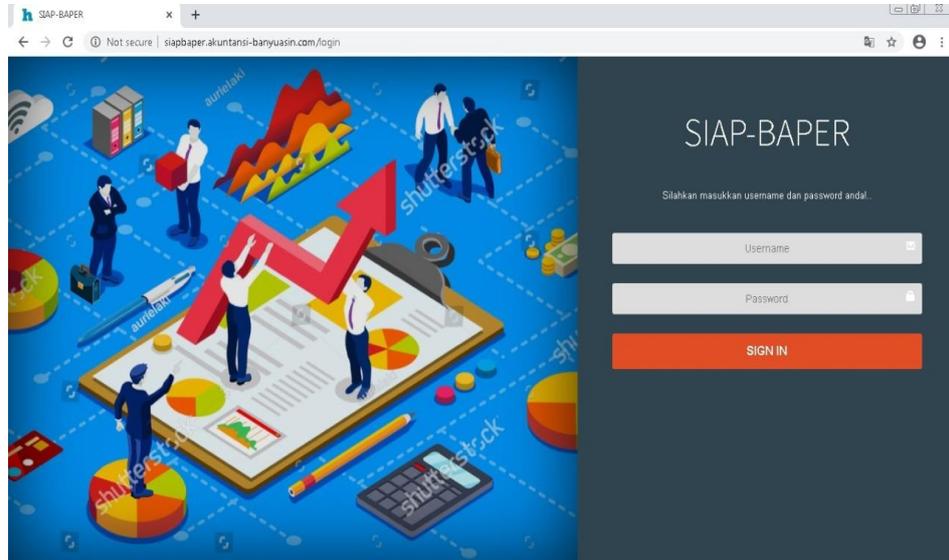
1. Pembangunan dan pengembangan **Sistem Informasi Kinerja (Simkinerja)** sebagai aplikasi pengumpulan, pengolahan, penghitungan dan pelaporan informasi/data kinerja dari tingkat eselon II sampai dengan Sasaran Kinerja Individu. Aplikasi ini bersifat online (*webbase*) dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin yang dapat diakses melalui IP. Address: <http://103.75.150.90/>.

Gambar 3.C.1
Aplikasi Kinerja Kabupaten Banyuasin



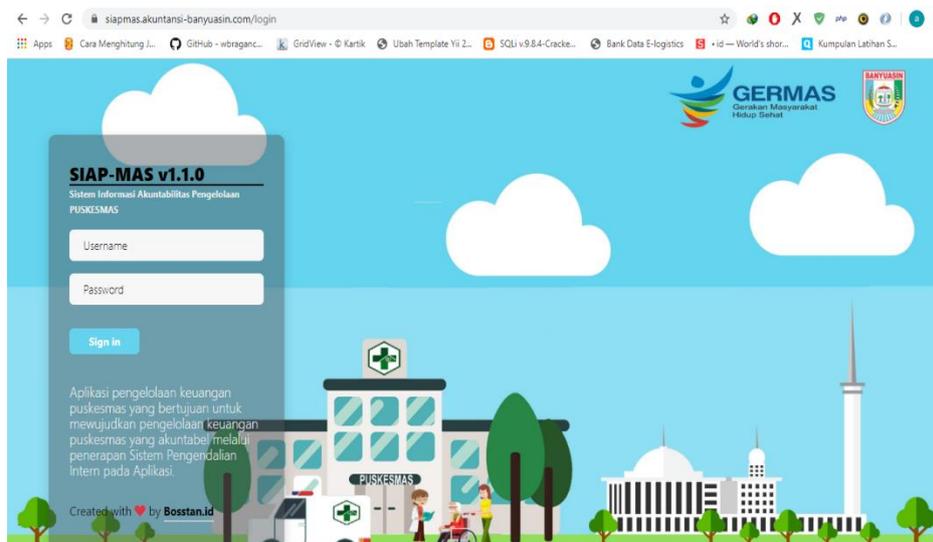
2. Pembangunan dan pengembangan **Sistem Informasi Barang Persediaan (Siapbaper)** sebagai aplikasi pengumpulan, pengolahan, penghitungan dan pelaporan informasi/data barang persediaan perangkat daerah. Aplikasi ini bersifat *online (webbase)* dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin yang dapat diakses melalui IP. Address: <http://siapbaper.akuntansi-banyuasin.com>.

Gambar 3.C.2
Aplikasi Sistem Informasi Barang Persediaan Kabupaten Banyuasin



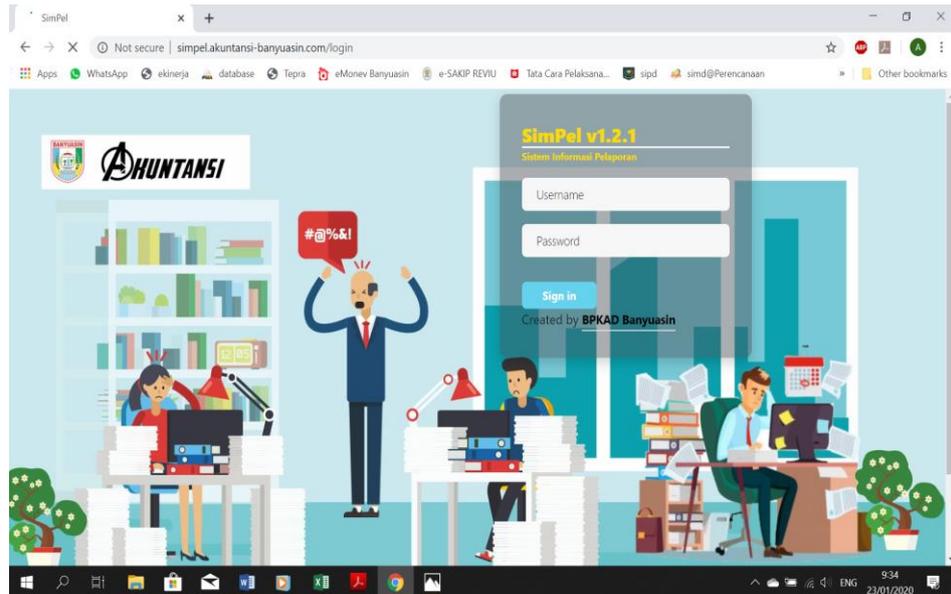
3. Pembangunan dan pengembangan **Sistem Informasi Akuntabilitas Pengelolaan Puskesmas (Siapmas)** sebagai aplikasi perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Puskesmas. Aplikasi ini bersifat *online (webbase)* dan dimanfaatkan oleh BPKAD, Dinas Kesehatan dan 33 Puskesmas dalam Kabupaten Banyuasin yang dapat diakses melalui IP. Adress: <http://siapmas.akuntansi-banyuasin.com>.

Gambar 3.C.3
Aplikasi Siapmas Kabupaten Banyuasin



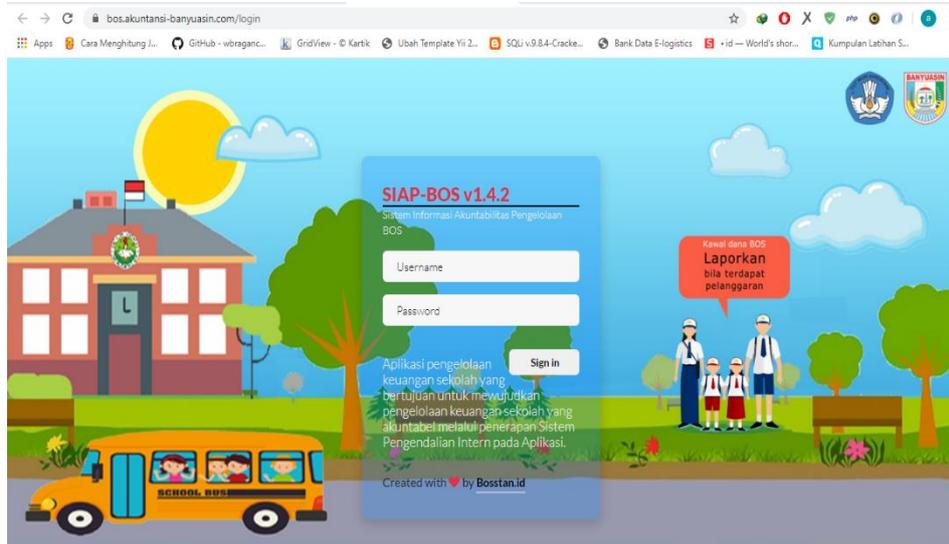
4. Pembangunan dan pengembangan **Sistem Informasi Pelaporan (Simpel)** sebagai aplikasi pelaporan dan pertanggungjawaban perangkat daerah. Aplikasi ini bersifat *online (webbase)* dan dimanfaatkan oleh seluruh perangkat daerah Kabupaten Banyuasin yang dapat diakses melalui IP. Adress: <http://simpler.akuntansi-banyuasin.com>.

Gambar 3.C.4
Aplikasi Simpel Kabupaten Banyuasin



5. Pembangunan dan pengembangan **Sistem Informasi Akuntabilitas Pengelolaan BOS (SiapBOS)** sebagai aplikasi perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sekolah dalam Kabupaten Banyuasin. Aplikasi ini bersifat *online (webbase)* dan dimanfaatkan oleh BPKAD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta 600 sekolah dalam Kabupaten Banyuasin yang dapat diakses melalui IP. Adress: <http://siapbos.akuntansi-banyuasin.com>.

Gambar 3.C.5
Aplikasi SiapBOS Kabupaten Banyuasin



6. Pembangunan dan pengembangan **Aplikasi Pengendalian dan Pengamanan Dokumen (Apelpen)** sebagai aplikasi pengendalian dan pengamanan dokumen barang milik daerah. Saat ini aplikasi ini baru digunakan oleh BPKAD Kabupaten Banyuasin. Ke depan aplikasi ini juga akan bersifat *online (webbase)* dan dapat digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin.

Gambar 3.C.6
Aplikasi Apelpen Kabupaten Banyuasin



7. Melakukan kerjasama dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk orientasi, supervisi, asistensi dan bimbingan teknis dalam rangka integrasi Perencanaan dan Penganggaran (Keuangan) melalui implementasi Simd@ Integrated sebagai upaya memenuhi rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tentang integrasi perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 06 Desember 2019 dengan melibatkan perangkat daerah yang terkait langsung, yaitu:
- a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuasin.
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) Kabupaten Banyuasin.
 - c. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin.
 - d. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin.
 - e. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin.

Gambar 3.C.7
Orientasi, Supervisi, Asistensi dan Bimbingan Teknis
Implementasi Simd@ Integrated Kabupaten Banyuasin



8. Melakukan kerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) RI cq. Deputi Pengembangan Organisasi dalam bentuk asistensi dan bimbingan teknis Penyusunan Peta Proses Bisnis BPKAD Kabupaten Banyuasin.

Gambar 3.C.8
Asistensi dan Bimbingan Teknis
Penyusunan Peta Proses Bisnis BPKAD Kabupaten Banyuasin



Sedangkan beberapa prestasi dan penghargaan yang diterima oleh BPKAD Kabupaten Banyuasin atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuasin selama tahun 2019 adalah:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 Kabupaten Banyuasin yang disampaikan melalui surat Nomor: No. 22.B/S-HP/XVIII.PLG/05/2019 tanggal 14 Mei 2019. Hal ini merupakan capaian ke delapan secara berturut-turut sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 LKPD Kabupaten Banyuasin mendapatkan opini WTP.

Gambar 3.C.9
Bupati Banyuasin Menerima Piagam WTP atas LKPD Tahun 2018 dari BPK RI



2. Penghargaan sebagai Pemerintah Daerah pertama di Sumatera Selatan yang memberikan perlindungan JKK dan JKM bagi pegawai non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dari PT. Taspem (Persero) Cabang Palembang.
3. Penghargaan dari Bank Sumselbabel sebagai peserta favorit kategori Penerapan Kebijakan pada Wilayah Sumatera Selatan
4. Penghargaan dari KPPN Sekayu Apresiasi atas Sinergi Aktif Mitra Kerja.
5. Penghargaan sebagai Juara I dalam Kecepatan dan Ketepatan Setoran IWP, JKK dan JKM Cawu I Tahun 2019 dari PT. Taspem (Persero).
6. Penghargaan sebagai Juara 3 dalam Kecepatan Pengiriman Data Gaji ASN Cawu I Tahun 2019 dari PT. Taspem (Persero).

BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuasin mencapai 106,89%. Capaian kinerja diperoleh dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Dari 4 indikator kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala BPKAD Kabupaten Banyuasin dengan Bupati Banyuasin, seluruhnya (100,00%) berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan satu indikator kinerja dengan capaian kinerja di atas 100,00% (127,57%). Capaian kinerja ini lebih baik dari capaian kinerja tahun 2018 sebelumnya dan juga lebih baik dari capaian kinerja rata-rata renstra periode 2014 – 2018 serta telah melampaui target tahapan renstra 2018 – 2023.

Capaian kinerja Indikator Perda APBD Ditetapkan Tepat Waktu sebesar 100,00% dengan realisasi anggaran sebesar 84,63%. Capaian kinerja tahun 2019 ini sama dengan capaian kinerja pada tahun 2018 dan capaian renstra 2014 – 2018. Realisasi anggaran ini lebih rendah dari capaian tahun 2018 yang sebesar 89,91% tetapi lebih baik dari rata-rata capaian renstra 2014 – 2018 yang hanya sebesar 83,84%.

Capaian kinerja Indikator Opini BPK terhadap LKPD n – 1 sebesar 100,00% dengan realisasi anggaran sebesar 89,67%. Capaian kinerja tahun 2019 ini sama dengan capaian kinerja pada tahun 2018 dan rata-rata capaian Renstra 2014 – 2018. Realisasi anggaran ini lebih tinggi dari capaian tahun 2018 yang sebesar 84,44% dan dari rata-rata capaian renstra 2014 – 2018 yang hanya sebesar 83,04%.

Capaian kinerja Indikator Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pelayanan sebesar 100,00% dengan realisasi anggaran sebesar 94,11%. Capaian kinerja tahun 2018 ini lebih tinggi dari capaian kinerja pada tahun 2017 dan rata-rata capaian renstra 2014 – 2018 yang hanya sebesar 98,63%. Realisasi anggaran ini lebih tinggi dari capaian tahun 2018 yang sebesar 84,44% dan dari rata-rata capaian renstra 2014 – 2018 yang hanya sebesar 83,04%.

Sampai dengan triwulan I tahun 2019, capaian indikator kinerja Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 127,57% dengan realisasi anggaran sebesar 98,71%. Capaian kinerja tahun 2019 ini merupakan rasio tertinggi dibandingkan rata-rata capaian renstra 2014 – 2018 yang mencapai 6,27%. Capaian ini menggambarkan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2019 dibandingkan dengan penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2018. Realisasi anggaran ini lebih tinggi dari capaian tahun 2018 yang sebesar 90,01% dan dari rata-rata capaian renstra 2014 – 2018 yang hanya sebesar 85,57%.



Di masa datang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin akan terus melakukan upaya-upaya peningkatan kinerja melalui:

1. Inovasi di bidang pengumpulan, pengolahan, pengukuran dan pelaporan kinerja dan keuangan melalui Aplikasi Kinerja dan Aplikasi Pelaporan.
2. *Updating* aplikasi Simda di bidang perencanaan, pengelolaan dan pelaporan anggaran dan barang milik daerah.
3. Peningkatan pelayanan kepada *stakeholders* melalui peningkatan kompetensi aparatur dan penganangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi *pilot project*.